

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN PRAKTIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN BERBAGAI
VARIABEL TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Manajemen**

Disusun Oleh :

MM RINI PURWANDARI

NIM. 015011756

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2012**

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI: MANAJEMEN

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Analisis Pengaruh Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* dan Berbagai Variabel terhadap Kinerja Keuangan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Desember 2012

Yang Menyatakan




(MM Rini Purwandari)

NIM 015011756

ABSTRACT

Analysis of Good Corporate Governance Practices Implementation and Other Variables Impact to Financial Performance of Port of Indonesia II

MM Rini Purwandari
Universitas Terbuka
poerwandarini@gmail.com

Key words: good corporate governance, financial performance, impact to return on equity, GCG implementation.

This research was conducted to test whether the implementation of good corporate governance practices are held at the Port of Indonesia II and the other variables had a significant influence on the financial performance that's proxied with return on equity. Implementation of the principles of good corporate governance was evident on the 'how' everyone in the company interact with each other according to their function in order to manage all the company activities effectively and efficiently. Each party has consistently and professionally performing their duties and responsibilities by adhering to the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

This research is descriptive and statistical parametric which aims to find the relationship between several variables. The relationship established is a causal relationship. In this study, the effect will be seen from the application of the principles of good corporate governance which together with operating income, debt equity ratio, rate of economic growth, and impact of monetary crisis on the financial performance of companies that's proxied by return on equity.

The hypothesis is that the implementation of GCG, operating revenues, the debt equity ratio, as well as the national economic growth rate significantly influence the rate of return on equity. The data used is secondary data obtained from the financial statements / annual reports and the corporate governance assessment report at The Port of Indonesia II from 1994 to 2011 and was also the official data are published widely by the Badan Pusat Statistik.

The analysis showed that the independent variables GCG implementation, operating revenue, debt equity ratio, rate of economic growth, and impact of monetary crisis simultaneously choose a significant impact on the level of corporate performance that's proxied by return on equity. More detailed analysis by examining the partial effect of each independent variable on the dependent variable return on equity yield. The conclusion: operating revenue, the good corporate governance implementation, debt equity ratio, and impact of monetary crisis that significantly influence the ROE. While national growth rate had no significant effect on the dependent variable ROE.

ABSTRAK**Analisis Pengaruh Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* dan Berbagai Variabel Terhadap Kinerja Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II**

MM Rini Purwandari
Universitas Terbuka
poerwandarini@gmail.com

Kata kunci: *good corporate governance*, kinerja keuangan, pengaruh pada *return on equity*, praktik GCG.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah penerapan praktik *good corporate governance* yang dilaksanakan pada PT Pelabuhan Indonesia II bersama-sama dengan variabel pendapatan usaha, pertumbuhan ekonomi nasional, debt equity ratio, dan dampak krisis moneter memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan *return on equity*. Implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* terlihat nyata pada 'cara bagaimana' setiap organ perusahaan berinteraksi satu sama lain sesuai fungsinya dalam rangka mengelola seluruh aktivitas perusahaan secara efektif dan efisien. Masing-masing pihak secara konsisten dan profesional menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan berpegang pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan keadilan (*fairness*).

Jenis penelitian ini adalah statistik deskriptif dan parametrik yang bertujuan mengetahui hubungan antara beberapa variabel. Hubungan yang dibentuk adalah hubungan sebab akibat. Dalam penelitian ini akan dilihat pengaruh dari penerapan prinsip-prinsip GCG yang secara bersama-sama dengan pendapatan usaha, *debt equity ratio*, serta tingkat pertumbuhan perekonomian nasional terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproyeksikan dengan *return on equity*.

Hipotesis yang dibangun adalah bahwa penerapan GCG, pendapatan usaha, tingkat *debt equity ratio*, serta tingkat pertumbuhan perekonomian nasional berpengaruh signifikan terhadap tingkat *return on equity*. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan/tahunan serta laporan hasil asesmen GCG pada PT Pelabuhan Indonesia II mulai tahun 1994 sampai dengan 2011 dan juga data statistik resmi yang dipublikasi secara luas oleh Badan Pusat Statistik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel independen penerapan GCG, pendapatan usaha, *debt equity ratio*, dan tingkat pertumbuhan perekonomian secara simultan memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kinerja perusahaan yang diproyeksikan dengan *return on equity*. Analisis lebih detail dengan menguji secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen *return on equity* menghasilkan simpulan bahwa pendapatan usaha, penerapan GCG dan *debt equity ratio* yang berpengaruh signifikan terhadap ROE. Sedangkan tingkat pertumbuhan nasional tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ROE.

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Analisis Pengaruh Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* dan Berbagai Variabel Terhadap Kinerja Keuangan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II

Penyusun TAPM : MM Rini Purwandari

NIM : 015011756

Program Studi : Magister Manajemen

Hari/Tanggal :

Menyetujui.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. IN Baskara Wisnu Tedja, M.Ec.
NIP 19581110 198601 1 001

Surachman Dimiyati, Ph.D.
NIP 19511208 197603 1 004

Mengetahui:

Ketua Bidang Program
Magister Manajemen,

Direktur Program
Pascasarjana,

Maya Maria, SE, MM
NIP 19720501 199903 2 003

Suciati M.Sc., Ph.D.
NIP 19520213 198503 2 001



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN

PENGESAHAN

Nama : MM Rini Purwandari
NIM : 015011756
Program Studi : Manajemen
Judul Tesis : Analisis Pengaruh Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* dan Berbagai Variabel Lainnya Terhadap Kinerja Keuangan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II

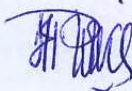
Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Manajemen, Universitas Terbuka pada:

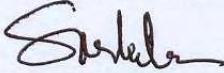
Hari/Tanggal : Minggu, 16 Desember 2012

Waktu : 13.00 s.d. 15.00


Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS:

Ketua Komisi Penguji : Dr. Ir. Sri Harijati, MA. 

Penguji Ahli : Dr. Said Kelana 

Pembimbing I : Dr. IN Baskara Wisnu Tedja, M.Ec.

Pembimbing II : Surachman Dimiyati, Ph.D. 

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih tak terhingga atas rahmat dan kasih Tuhan yang telah menyertai dan menjaga sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM ini. TAPM ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Sadar sepenuhnya bahwa ada banyak pihak yang telah berperan serta memberikan bantuan, bimbingan, dan dorongan semangat pada saya, mulai dari awal perkuliahan hingga penyusunan dan penulisan TAPM ini. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Kepala UPBJJ-UT Jakarta selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
3. Bapak I Nengah Baskara dan Bapak Surachman Dimiyati yang telah bersedia berdiskusi, membimbing, dan memberikan dorongan semangat kepada saya dalam penyusunan dan penyelesaian penulisan TAPM ini.
4. Ketua Bidang Program Magister Manajemen selaku penanggungjawab Program Magister Manajemen;
5. Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II yang berkenan membantu perolehan data dan informasi yang saya perlukan.
6. Teman-teman Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta yang bersedia berdiskusi dan menjadi sumber inspirasi saya.

7. Buah hati tercinta Inez, Chacha, dan Tisya yang senantiasa menjadi penyemangat dan alasan untuk tak pernah berhenti meraih mimpi;
8. Seorang sahabat terbaik, yang tanpanya saya ragu TAPM ini berhasil saya selesaikan.

Segala kebaikan yang saya alami tersebut, sangat luar biasa artinya bagi diri saya. Doa dan harapan saya panjatkan, karena hanya Tuhan yang mampu dan berkenan memberikan balasan yang setimpal.

Dengan kerendahan hati saya persembahkan TAPM yang jauh dari sempurna ini semoga membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Desember 2012

Penulis.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISI

	halaman
Pernyataan Orisinalitas TAPM	i
Abstrak	ii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Rumus	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teori	12
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Berpikir	32
D. Pokok Bahasan	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Desain Penelitian	36
B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	36
C. Metode Pengumpulan Data	40
D. Populasi dan Sampel Penelitian	42
E. Metode Analisis Data	42
 BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	 48
A. Gambaran Umum dan Deskriptif Data Obyek Penelitian	48
1. Gambaran umum PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II	48
2. Deskripsi data obyek penelitian	51
B. Uji Asumsi Klasik	54
1. Hasil uji normalitas	54
2. Hasil uji multikolinieritas	56
3. Hasil uji heteroskedastisitas	57
4. Hasil uji autokorelasi	58
C. Pengujian Hipotesis	59
1. Hasil uji pengaruh simultan (uji F)	59
2. Koefisien determinasi	60
3. Hasil uji signifikansi parameter individual (t test)	61
D. Pembahasan	66
1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap ROE	69
2. Pengaruh pencapaian pendapatan usaha terhadap ROE ..	75
3. Pengaruh <i>debt equity ratio</i> n-1 terhadap ROE	80

4. Pengaruh pemenuhan prinsip-prinsip GCG terhadap ROE	82
5. Pengaruh dampak krisis moneter periode 1997-1999 terhadap ROE	93
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	96
A. Simpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Skor <i>Corporate Governance</i> di Negara-Negara Asia	2
Tabel 1.2 Tingkat Ekspor dan Impor Nasional	10
Tabel 4.1 Statistik deskriptif	51
Tabel 4.2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	55
Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas	56
Tabel 4.4 Coefficient Correlations	57
Tabel 4.5 Uji Durbin-Watson	58
Tabel 4.6 Uji simultan antara variabel independen dengan variabel dependen	60
Tabel 4.7 Koefisien Determinasi	60
Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Pengujian Parameter Individual	61
Tabel 4.9 Pertumbuhan Ekonomi, Kunjungan Kapal di 5 Pelabuhan Besar Indonesia, Volume Ekspor & Impor, dan Pendapatan Usaha Pelindo II	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Total Aktiva, Ekuitas, Pendapatan Usaha dan Laba Bersih PT Pelabuhan Indonesia II	4
Gambar 1.2 Tingkat Ekspor dan Impor Nasional	5
Gambar 2.1 Skema <i>Good Corporate Governance</i>	22
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penerapan GCG, Pendapatan Usaha, DER, Pertumbuhan Ekonomi Nasional, dan Dampak Krisis Moneter Terhadap Kinerja Keuangan	34
Gambar 4.1 ROE, DER, GCG, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Usaha	52
Gambar 4.2 Grafik Histogram	54
Gambar 4.3 Normal probably plot of standardized residual	55
Gambar 4.4 Grafik Scatterplot	58
Gambar 4.5 Grafik Model Persamaan Regresi	65
Gambar 4.6 Capaian Aktual dan Trend Return on Equity	69
Gambar 4.7 Tingkat Aktual dan Trend Pertumbuhan Ekonomi Nasional	71
Gambar 4.8 Ringkasan Laporan Laba-Rugi PT Pelabuhan Indonesia II	76
Gambar 4.9 Capaian Aktual dan Trend Pendapatan Usaha	77
Gambar 4.10 Capaian Aktual dan Trend <i>Debt Equity Ratio</i>	82
Gambar 4.11 Capaian Aktual dan Trend Pemenuhan Prinsip GCG	84

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 2.1) <i>Weighted average cost of capital</i>	18
Rumus 3.1) <i>Return on equity</i>	37
Rumus 3.2) Pertumbuhan ekonomi nasional	38
Rumus 3.3) <i>Debt equity ratio</i>	39
Rumus 3.4) Model regresi	45
Rumus 3.5) F_{hitung}	46
Rumus 3.6) t_{hitung}	47
Rumus 3.7) Koefisien determinasi R^2	47
Rumus 4.1) Hasil Pengujian Regresi	62

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data Penelitian	105
Lampiran 2 Data Laporan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II Tahun 1994 sampai dengan 2011	106
Lampiran 3 Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS	109
Lampiran 4 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Kunjungan Kapal, Ekspor dan Impor, serta Pendapatan Usaha Pelindo II	115

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi global pada tahun 2011 tumbuh melambat menjadi sebesar 3,8%, setelah pada tahun sebelumnya mencapai 5,1%. Perlambatan ini bersumber dari tajamnya penurunan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju sebagai dampak dari memburuknya krisis utang pemerintah di Amerika Serikat dan Eropa serta bencana alam di Jepang. Perkembangan tersebut berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang (*emerging markets*) yang juga menurun sebagai akibat melemahnya permintaan produk ekspor negara-negara tersebut. Dampak lebih lanjut adalah perlambatan aktivitas perdagangan (ekspor dan impor) di negara-negara *emerging markets*, termasuk di kawasan Asia. Namun demikian, perekonomian Indonesia ternyata menunjukkan peningkatan pertumbuhan pada tahun 2011 yang mencapai 6,3%, dibanding tahun sebelumnya yang berada pada angka 6%. Kemampuan perekonomian Indonesia untuk tumbuh tinggi di tengah ekonomi dunia yang melemah didukung baik oleh meningkatnya kinerja ekonomi domestik maupun kinerja ekspor yang masih tinggi. Aktivitas perdagangan barang baik domestik maupun ekspor impor yang relatif stabil tersebut menimbulkan arus lalu lintas barang keluar dan masuk negara Indonesia maupun lalu lintas antar pulau yang makin meningkat.

Pelabuhan merupakan pintu gerbang perekonomian nasional dimana arus keluar-masuk barang ke dan dari luar Indonesia maupun lalu lintas perdagangan domestik antar pulau memerlukan jasa pelayanan kepelabuhanan. Ketersediaan,

kapasitas dan kemampuan pelayanan bongkar muat barang di setiap wilayah memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah setempat yang berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Karena sedemikian pentingnya fungsi tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelabuhan sebagai sarana utama menggerakkan perekonomian di seluruh wilayah Indonesia, sebarangpun aktivitas arus lalu lintas yang ada atau terjadi di wilayah tersebut.

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia merupakan perusahaan milik negara yang (pada awalnya) diberi tugas tanggung jawab dan monopoli hak pengelolaan atas jasa kepelabuhanan. Bidang usahanya meliputi penyediaan dan pengusahaan:

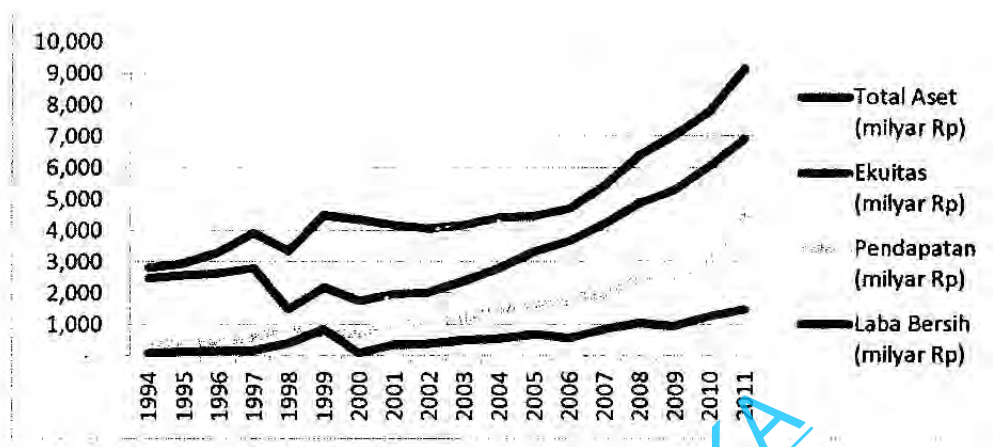
- a. Perairan dan kolam pelabuhan untuk lalu lintas pelayaran dan tempat kapal berlabuh;
- b. Pelayanan pemanduan (*pilotage*) dan penundaan kapal keluar masuk pelabuhan, olah gerak kapal di dalam kolam pelabuhan, serta jasa pemanduan dan penundaan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya;
- c. Pelayanan bongkar muat kendaraan dan alat berat;
- d. Fasilitas untuk kapal bertambat serta melakukan bongkar muat barang dan hewan;
- e. Fasilitas pergudangan dan lapangan penumpukan;
- f. Terminal konvensional, terminal petikemas, dan terminal curah untuk melayani bongkar muat komoditas sesuai jenisnya;
- g. Terminal penumpang untuk pelayanan embarkasi dan debarkasi penumpang kapal laut;
- h. Fasilitas listrik, air minum, dan telepon untuk kapal dan umum di daerah lingkungan kerja pelabuhan;

- i. Lahan untuk industri, bangunan, dan ruang perkantoran umum;

Perkembangan dan kegiatan usaha pelabuhan sangat terkait dengan dinamika perekonomian nasional maupun internasional. Peningkatan atau penurunan volume perdagangan dalam wilayah operasional pelabuhan akan sangat mempengaruhi arus keluar – masuk kapal maupun aktivitas bongkar-muat komoditi yang dibawanya. Dengan demikian tingkat pertumbuhan perekonomian yang selanjutnya tercermin dalam aktivitas ekspor dan impor Indonesia (selain aktivitas perdagangan antar pulau) akan menjadi faktor dominan yang berpengaruh pada perolehan pendapatan penyelenggara jasa pelabuhan. Hingga saat ini PT Pelabuhan Indonesia I s.d. IV masih mendominasi bisnis jasa kepelabuhanan, meski Pemerintah telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk masuk dalam bisnis penyelenggaraan jasa kepelabuhanan ini. Namun karena kebutuhan investasi dalam hal pendanaan, kompetensi maupun teknologi sangat besar dibanding tingkat pengembalian yang memerlukan waktu cukup panjang, maka bisnis ini belum banyak menarik perhatian pemain baru. Faktor persaingan usaha hanya muncul dalam skala regional, seperti pelabuhan di Singapura dan Malaysia. Dengan demikian setiap perkembangan atau pertumbuhan perekonomian akan memberikan dampak positif bagi upaya perusahaan untuk meningkatkan skala usaha dan pendapatannya.

Selanjutnya, pengelolaan pendapatan dan efisiensi biaya sehingga menghasilkan tingkat laba yang optimal akan sangat ditentukan oleh kemampuan manajerial serta tata kelola perusahaan (*corporate management and governance*). Seberapa besar Perusahaan mampu menghasilkan tingkat pengembalian (*return*) dari investasi yang telah dilakukan Pemegang Saham maupun besarnya sumber

daya yang dimiliki secara keseluruhan (aktiva), sangat bergantung pada mekanisme tata kelola yang dilakukan oleh masing-masing maupun antar organ korporasi.

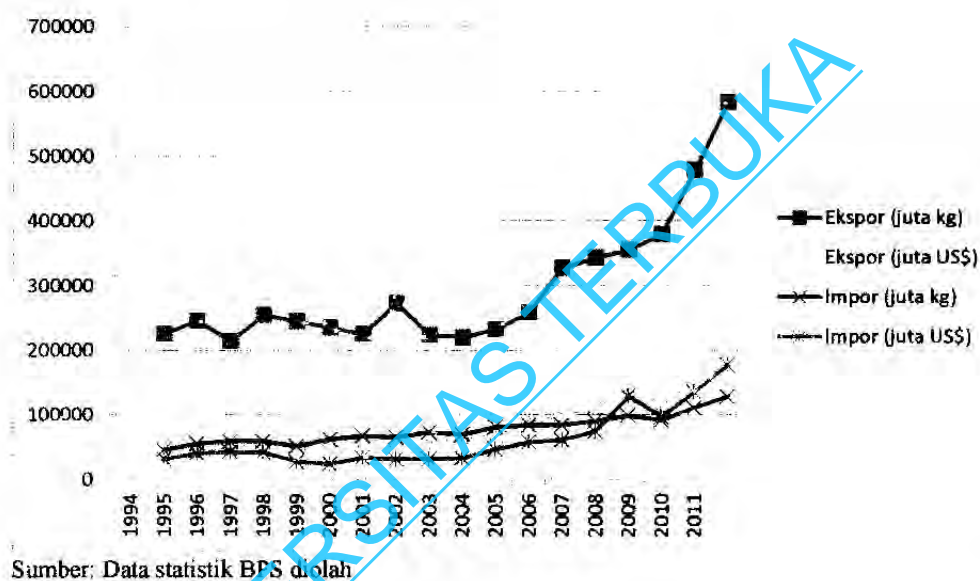


Sumber: Data sekunder diolah

Gambar 1.1 Total Aktiva, Ekuitas, Pendapatan Usaha dan Laba Bersih PT Pelabuhan Indonesia II

Memperhatikan grafik yang disajikan dalam Gambar 1.1. di atas dapat dilihat bahwa bisnis yang digeluti Pelindo II sebagai salah satu dari 4 BUMN penyelenggara jasa kepelabuhanan merupakan bisnis yang padat modal dan memerlukan investasi aset sangat besar. Secara rata-rata tingkat pendapatan usaha yang dapat diperoleh melalui investasi aset lebih dari Rp 4,5 triliun tersebut adalah sekitar 25%. Berdasarkan laporan keuangan audited perusahaan tahun 2001 sampai dengan 2011, pendapatan usaha mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3%-14%, sebanding dengan peningkatan aktivitas ekspor dan impor yang identik dengan lalu lintas barang dari dan keluar Indonesia. Namun demikian, peningkatan laba bersih mulai tahun 2001 sebesar Rp 357 milyar hingga tahun 2008 dengan laba bersih mencapai Rp 1047 milyar (meski kemudian menurun tajam dalam tahun 2009 menjadi Rp 697 milyar), belum mencerminkan peningkatan kinerja perusahaan yang cukup signifikan sebagai dampak praktik-

praktik tata kelola perusahaan yang makin baik. Tingkat pengembalian (*return*) yang diharapkan dengan penambahan investasi yang dilakukan setelah tahun 2002 belum menunjukkan peningkatan yang seimbang. Berkaitan dengan kinerja keuangan Pelindo II tersebut, pendapatan usaha sangat bergantung pada tingkat pertumbuhan arus barang yang menggunakan transportasi laut. Menurut data statistik, tingkat arus barang keluar-masuk Indonesia yang diindikasikan dari tingkat ekspor dan impor menunjukkan pertumbuhan yang stabil sejak tahun 2004 hingga 2011 yang lalu.



Gambar 1.2 Tingkat Ekspor dan Impor Nasional

Pasang surutnya arus lalu lintas barang yang menggunakan jasa transportasi laut sangat mempengaruhi volatilitas pendapatan usaha penyelenggara jasa kepelabuhanan. Menyikapi peluang yang terbentuk dari pertumbuhan perekonomian nasional, manajemen PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II melakukan peningkatan produktivitas secara berkesinambungan di seluruh wilayah operasional cabang pelabuhan. Serangkaian program perbaikan maupun peningkatan yang dilakukan mencakup bidang fasilitas fisik, prosedur dan tata

cara kerja, maupun kompetensi sumber daya manusia. Pada tahun 2010, perusahaan melakukan program pengembangan fasilitas fisik terkait dengan penataan fasilitas pelabuhan maupun pengadaan peralatan bongkar muat di pelabuhan guna meningkatkan efisiensi pelayanan kapal dan barang. Peningkatan efisiensi pelayanan tersebut pada gilirannya diharapkan akan mendorong terciptanya sistem logistik nasional yang lebih efisien dan rasional dan dapat menjamin kepastian usaha bagi pengguna jasa kepelabuhanan.

Secara teoritis konsep korporasi merupakan mekanisme yang dibangun agar berbagai pihak dapat memberikan kontribusi berupa modal, keahlian (*expertise*), dan tenaga demi manfaat bersama. Komponen yang dipersyaratkan dalam konsep korporasi tersebut, pada dasarnya merupakan peran dan tanggung jawab masing-masing organ yang membentuk korporasi, yaitu pemilik (pemegang saham), direksi, dan komisaris. Pada saat semua pihak berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan korporasi, tata kelola perusahaan (*corporate governance*) sudah terbentuk dan berjalan. Masalah yang belum mendapat perhatian pada masa-masa sebelum krisis global tahun 1997-an adalah seberapa baikkah tata kelola tersebut berjalan dan/atau bagaimana masing-masing organ korporasi melaksanakan tugas dan fungsinya, belum dicermati dan diukur pemenuhannya. Dengan kata lain, sampai dimana tingkat pemenuhan atau kepatuhan perusahaan dalam menjalankan praktik-praktik korporasi yang sehat?

Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 serta perubahannya nomor PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, mewajibkan BUMN menerapkan GCG

secara konsisten dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN. Dengan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan, guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Restrukturisasi BUMN dapat dipandang sebagai upaya yang dilakukan agar BUMN dapat beroperasi secara lebih efisien, *profitable*, kompetitif, transparan, dan profesional. Dengan demikian BUMN dapat memberikan produk dan atau layanan terbaik dengan harga yang kompetitif kepada konsumen, serta memberikan deviden dan pajak yang makin meningkat kepada negara. Dalam konteks ini, upaya-upaya yang diarahkan pada pencapaian tujuan tersebut, berupa penumbuhan kepedulian menjalankan praktik-praktik GCG, pemahaman akan esensinya, penjabarannya dalam operasi perusahaan sehari-hari, monitoring dan evaluasi atas penerapannya, serta pengembangannya secara berkelanjutan menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa standar praktik-praktik terbaik (*best practices*) penerapan GCG telah dicapai.

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II merupakan perusahaan milik negara yang (pada awalnya) diberi monopoli hak pengelolaan atas jasa kepelabuhanan, sehingga secara teoritis seringkali dikatakan bahwa keutamaan atau *privilege* monopoli cenderung menjerumuskan perusahaan menjadi tidak efisien karena hak istimewa ini. Sejalan dengan posisi strategis yang dimilikinya, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia (selanjutnya disebut Pelindo II) termasuk dalam 16 BUMN

yang diprogramkan melaksanakan reformasi dalam ruang lingkup budaya kerja, strategi dan pengelolaan usaha untuk mewujudkan profesionalisme dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip *good corporate governance* di dalam pengelolaan perusahaan.

Penerapan praktik-praktik *good corporate governance* tadi tidak semudah pemahaman atas konsepnya. Terlebih untuk lingkungan usaha kepelabuhanan yang dalam masyarakat umum dicitrakan sebagai wilayah yang sarat dengan praktik kolusi korupsi dan nepotisme (KKN), penggelembungan harga (*mark-up*), premanisme dan pungutan liar (*pungli*). Belum lagi adanya mitos bahwa BUMN tidak mungkin berprestasi, karena: (1) memegang monopoli, (2) konsep 'negara' sebagai pemilik adalah tidak jelas; dan (3) intervensi politik (Tjager, 2003). Bahkan berdasarkan analisis ICW menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah kasus korupsi yang sangat tajam pada BUMN dan BUMD (Arrsa, 2010). Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang mendasar untuk melakukan perbaikan infrastruktur *corporate governance*, yang mencakup komitmen untuk menjalankan praktik-praktik GCG, struktur, dan proses *governance* di seluruh aspek dan lapisan manajemen maupun karyawan Pelindo II. Dari sudut pandang manajerial, pertanyaan tentang sampai sejauh mana kondisi penerapan GCG berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik menjadi pertanyaan yang menarik.

Proses dan praktik tata kelola yang efektif akan berkembang dan terbentuk sesuai karakteristik masing-masing organisasi dan tidak akan menjadi praktik yang universal (Erakovic et.al., 2008). Sifat, intensitas, dan efektivitas tata kelola korporat merupakan kombinasi hasil dari banyak faktor. Oleh karenanya, metodologi dan upaya yang harus dilakukan oleh suatu organisasi untuk

menerapkan prinsip-prinsip GCG dan bentuk implementasinya, sangat tergantung pada skala bisnis, etos kerja, budaya organisasi, lingkungan usaha, dan banyak hal lain yang spesifik mungkin hanya cocok untuk organisasi tertentu dan tidak 'pas' untuk badan usaha lainnya.

Mencermati tingkat capaian pemenuhan praktik-praktik terbaik GCG selama periode pengukuran mulai tahun 2003 yang berkisar pada angka perolehan 79,40 dan tingkat capaian 83,36 pada periode tahun 2009, berdasarkan Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara keseluruhan menunjukkan tingkat capaian pemenuhan praktik-praktik GCG yang makin meningkat pada kategori 'baik'. Sebagian besar infrastruktur yang diperlukan untuk membangun tatanan GCG telah dimiliki, seperti misalnya: pedoman-pedoman GCG (*Code of Corporate Governance, Code of Conduct, Internal Audit Charter, Committee Audit Charter*), Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, Komite Manajemen Risiko, dll. Lebih dari *hard factor* tersebut, upaya mewujudkan praktik-praktik terbaik GCG membutuhkan suatu komitmen yang bulat, solusi yang *holistik* dan proses yang panjang, energi kolektif dan stamina yang prima dari seluruh organ korporasi.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, pencapaian pendapatan usaha, komposisi hutang dibandingkan ekuitas periode lalu, penerapan praktik-praktik *good corporate governance* yang telah dilaksanakan Pelindo II, serta dampak krisis moneter

secara bersama-sama telah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pelindo II yang diindikasikan melalui peningkatan *return on equity*.

Secara teoritis, kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh faktor eksternal (target pasar dan aktivitas perekonomian) serta faktor internal (pengelolaan perusahaan). Berdasarkan identifikasi yang telah disampaikan di atas, penulis membatasi permasalahan pada peran penerapan praktik GCG sebagai penguatan sistem manajemen dalam peningkatan nilai perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan perusahaan, yang ditunjukkan dalam indikator rasio *return on equity* sebagai proxy dari peningkatan kesejahteraan pemegang saham Pelindo II. Selain penerapan GCG, terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap capaian kinerja perusahaan. Namun dalam penelitian ini, penulis membatasi variabel bebas yang juga berpengaruh pada tingkat capaian kinerja perusahaan adalah tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai faktor eksternal serta pendapatan usaha dan *debt equity ratio* sebagai faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja perusahaan.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan penerapan praktik-praktik GCG, pendapatan usaha perusahaan, *debt equity ratio*, tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia, dan dampak krisis moneter terhadap kinerja keuangan perusahaan yang ditunjukkan pada rasio *return on equity* (ROE).

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi manajemen dalam rangka peningkatan nilai perusahaan melalui efektivitas sistem manajemen yang

diperkuat dengan implementasi GCG di PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II. Se jauh mana implementasi GCG yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat dalam mendorong pengelolaan perusahaan secara transparan, profesional, dan efisien sehingga berdampak terhadap peningkatan nilai perusahaan dalam bentuk *trend* kinerja perusahaan yang tinggi (*high performance*).

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Dampak pertumbuhan perekonomian nasional terhadap *return on equity*

Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang menggambarkan pertumbuhan produksi barang dan jasa dalam cakupan wilayah perekonomian dalam suatu periode tertentu. Peningkatan aktivitas perekonomian ditandai dengan makin meningkatnya produktivitas masyarakat dan dunia usaha, yang kemudian mendorong arus lalu lintas perdagangan barang dari dan ke luar Indonesia maupun perdagangan domestik antar wilayah di dalam negeri.

Pelabuhan merupakan gerbang utama lalu lintas barang yang menggunakan moda transportasi laut sebagai sarana pengangkutannya. Peningkatan aktivitas perdagangan baik domestik, regional, maupun global akan berdampak langsung pada meningkatnya permintaan atas pelayanan jasa kepelabuhanan. Demikian pula akan terjadi sebaliknya apabila tingkat perekonomian melemah dan produktivitas menurun. Masalah lain yang dapat terjadi adalah apabila terjadi hambatan atau sumbatan pada gerbang lalu lintas transportasi di pelabuhan ini, karena moda transportasi laut mendominasi angkutan barang, maka laju perekonomian di suatu wilayah pun kemungkinan akan terpengaruh karenanya.

Kebutuhan pelayanan jasa pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia merupakan potensi pasar yang terus berkembang dan menjadi *captive market*

pengelola jasa pelabuhan untuk terus mengembangkan kapasitas agar mampu menangkap peluang pasar tersebut. Mengingat jenis komoditi, volume barang, maupun kebutuhan spesifik pengguna jasa pelabuhan yang mungkin berbeda-beda pada masing-masing wilayah pelabuhan, maka diperlukan ketajaman analisis dari manajemen untuk membuat perencanaan strategis yang menyangkut kapasitas produksi yang harus disiapkan pada masing-masing wilayah pelabuhan sesuai karakter pasar masing-masing. Analisis atas kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) perusahaan, yang kemudian dihadapkan pada peluang usaha (*opportunity*) dan ancaman (*threath*) yang mungkin dihadapi dalam jangka pendek maupun jangka panjang, akan memungkinkan perusahaan menyiapkan alat produksi yang diperlukan pada tingkat yang paling optimal. Terlebih karena pelayanan jasa kepelabuhanan memerlukan investasi infrastruktur dan fasilitas yang tidak dapat dengan mudah dilakukan penyesuaian pada jangka pendek.

Tujuan utama pembentukan korporasi adalah menghasilkan laba usaha dan sebesar-besarnya peningkatan nilai kesejahteraan pemegang saham. Peningkatan nilai perusahaan diwujudkan dalam bentuk nilai saham yang makin tinggi diperoleh melalui pencapaian nilai pendapatan usaha yang meningkat serta optimalisasi/efektivitas biaya. Bagi penyelenggara jasa kepelabuhanan, makin banyak permintaan jasa yang mampu dilayani, akan meningkatkan nilai pendapatan usaha, serta pada akhirnya memperbesar peluang tercapainya kinerja keuangan yang meningkat pula. Mengacu pada teori skala ekonomi, tingkat produksi yang meningkat sampai pada batas kapasitas yang tersedia memerlukan biaya produksi per unit makin kecil sehingga akan menghasilkan tingkat rentabilitas yang makin besar. Terlebih bagi penyelenggaraan jasa kepelabuhanan

yang sebagian terbesar biayanya merupakan beban tetap berupa penyediaan infrastruktur dan fasilitas. Makin besar permintaan jasa yang mampu dilayani, sifatnya lebih pada memanfaatkan kapasitas yang telah terpasang dan akan menurunkan biaya produksi per unit pelayanan. Dengan demikian keberlangsungan dan bahkan makin meningkatnya nilai perusahaan penyelenggara jasa pelabuhan sedikit banyak dipengaruhi kemampuan manajemen dalam memanfaatkan peluang pasar melalui pengelolaan investasi yang tepat.

2. Dampak pendapatan usaha terhadap *return on equity*.

Penyelenggaraan jasa kepelabuhanan merupakan jenis usaha yang menopang perkembangan perekonomian suatu wilayah dan memerlukan investasi infrastruktur sangat besar. Pada awalnya penyediaan dan penyelenggaraan operasional pelabuhan menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah, yang kemudian menyerahkan hak eksklusif ini kepada BUMN Pelabuhan Indonesia. Nilai kebutuhan investasi yang sangat besar menciptakan monopoli karena ketidakmampuan pihak lain masuk dalam bisnis jasa kepelabuhanan.

Ketika suatu perusahaan beraktivitas dalam monopoli yang dijamin Pemerintah, mereka tidak terlalu peduli dengan pihak-pihak lain yang berusaha masuk dalam pasarnya (Mankiw, 2004). Dalam kondisi monopoli yang sedemikian, kurva permintaan yang dihadapi perusahaan adalah kurva permintaan pasar. Kurva permintaan pasar memberikan suatu syarat atas kemampuan suatu monopoli untuk menarik keuntungan dari kekuasaan pasar yang dimilikinya. Perusahaan berpeluang meningkatkan produksi semaksimal mungkin untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan pasar. Namun karena jasa kepelabuhanan

merupakan penyediaan jasa vital yang sangat menentukan denyut perekonomian wilayah dan nasional atau dengan kata lain menguasai hajat hidup orang banyak, maka pemberian hak eksklusif ini dibarengi dengan pembatasan atau penentuan harga jual produk/jasa yang diselenggarakan. Dampak intervensi tersebut mengakibatkan pendapatan perusahaan hanya dipengaruhi permintaan pasar sampai pada batas kapasitas produksinya.

Korporasi merupakan bentuk badan usaha yang didirikan utamanya untuk meningkatkan nilai pemegang saham, atau dengan kata lain menghasilkan keuntungan maksimal. Dalam kerangka tersebut, manajemen perusahaan perlu mengetahui bagaimana mengolah faktor-faktor produksi secara optimal sehingga menghasilkan keluaran hasil (*outcome*) yang optimal, yaitu:

- a. Bagaimana memilih kombinasi penggunaan input untuk menghasilkan output dengan produktivitas dan efisiensi tinggi?
- b. Bagaimana menentukan tingkat output yang optimal untuk tingkat penggunaan input tertentu?
- c. Bagaimana memilih teknologi yang tepat sesuai dengan kondisi perusahaan?

Pengambilan keputusan mengenai ketiga hal di atas terkait dengan dimensi waktu, jangka pendek dimana teknologi dan kapasitas produksi tidak berubah serta jangka panjang yang merupakan periode dimana semua input produksi berperilaku variabel. Seluruh analisis tersebut perlu dipertimbangkan dan direncanakan secara seksama untuk memperoleh skala produksi optimal serta kapan dan seberapa besar investasi infrastruktur maupun peralatan/fasilitas harus dilakukan. Skala produksi jasa adalah gambaran mengenai arah atau

kecenderungan (trend) dari hubungan antara kombinasi penggunaan input (tetap dan variabel) dengan output jasa yang dihasilkan. Melalui perencanaan produksi jangka panjang, perusahaan tidak hanya akan memperoleh laba usaha melainkan akan terus bertumbuh menghasilkan peningkatan nilai perusahaan.

Optimalisasi tingkat laba dapat diperoleh melalui efisiensi biaya maupun optimalisasi pendapatan. Efisiensi produksi terkait penghematan proses produksi yang dilakukan melalui berbagai kombinasi penggunaan input dan bermuara pada makin rendahnya biaya per unit produksi. Efisiensi dapat diperoleh melalui 2 pendekatan (Noor, 2011):

- a. Efisiensi teknis, yang diukur dengan minimalnya proses yang tidak perlu dalam berproduksi. Efisiensi dicapai dengan berbagai cara kombinasi penggunaan unit input yang minimum.
- b. Efisiensi ekonomi, diukur dengan makin kecilnya biaya per unit produksi yang dihasilkan. Efisiensi dapat dicapai dengan berbagai teknik penggunaan kombinasi jenis input dengan biaya serendah mungkin.

Keterbatasan pengelola usaha dalam menentukan kurva pendapatan mereka, menyebabkan porsi keuntungan sangat ditentukan oleh perilaku biaya produksi yang dapat mereka pengaruhi. Dalam ilmu mikro ekonomi, skala ekonomi merujuk kepada keuntungan biaya yang berhubungan dengan ekspansi usaha. Seberapa baik perusahaan mampu memanfaatkan keuntungan yang diperoleh dari skala dan ruang lingkup ekonomis (*economies of scale and scope*) serta penggunaan teknologi baru yang memiliki kemampuan efisiensi biaya, akan menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan bahkan meningkatkan laba usaha.

Misi setiap perusahaan adalah untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh *customer*. Untuk dapat menyediakan barang dan jasa tersebut, setiap perusahaan harus mengkombinasikan faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, mesin, proses kerja, dan teknologi otomatisasi. Tetapi, hanya sekedar mengkombinasikan akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan biaya produksi meningkat, sehingga harga barang dan jasa yang dihasilkan tidak dapat diterima oleh pasar atau dengan kata lain tidak mampu mengikat kesetiaan konsumen. Yang harus dilakukan adalah mengkombinasikan faktor produksi secara optimum, sehingga proses produksi dan pelayanan dapat dilakukan secara efisien dan murah. Dengan demikian, tujuan perusahaan yakni mendapatkan keuntungan maksimal akan dapat diraih.

3. Dampak *debt equity ratio* terhadap *return on equity*.

Pemenuhan kebutuhan pendanaan dalam menjalankan usaha merupakan masalah penting yang harus direncanakan sejak awal dan terus dikelola sepanjang operasional perusahaan berjalan. Penggunaan dana menimbulkan biaya dana (*cost of fund*), baik yang dimanfaatkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila sumber pendanaan akan dimanfaatkan dalam periode/jangka panjang, lebih spesifik disebut sebagai biaya modal (*cost of capital*).

Biaya dana jangka panjang terdiri dari biaya modal sendiri dan biaya hutang jangka panjang yang secara rata-rata akan menghasilkan biaya modal rata-rata tertimbang dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Biaya modal sendiri (*cost of equity*), yang terdiri dari biaya saham biasa dan biaya saham istimewa. Secara teoritis biaya saham biasa sama dengan

minimum penghasilan dari investasi yang dilakukan. Sedangkan biaya saham istimewa adalah fungsi dari dividen yang dibayarkan perusahaan.

- b. Biaya hutang jangka panjang (*cost of debt*), yaitu jumlah beban bunga hutang jangka panjang yang harus dibayarkan perusahaan setelah pajak.

Karena pembiayaan perusahaan berasal dari berbagai sumber, maka biaya dana perusahaan secara keseluruhan untuk setiap unit modal harus memperhatikan porsi dari masing-masing sumber dana. Biaya per unit modal perusahaan diperhitungkan dengan rumusan rata-rata biaya modal tertimbang (*weighted average cost of capital/WACC*) sebagai berikut:

$$WACC = (w_i \times k_i) + (w_p \times k_p) + (w_s \times k_r) \dots\dots\dots 2.1)$$

Dimana:

w_i = proporsi hutang dalam struktur permodalan

w_p = proporsi saham preferen dalam struktur permodalan

w_s = proporsi saham biasa dalam struktur permodalan

k_i = biaya hutang (*cost of debt*)

k_p = biaya saham preferen (*cost of preferred stock*)

k_r = biaya saham biasa (*cost of common stock*) yang telah beredar.

Biaya modal yang optimum terkait erat dengan kemampuan manajemen dalam menyeimbangkan kombinasi berbagai sumber pendanaan, hasil pengembalian (*return*) investasi, serta risiko usaha yang dihadapi.

Sesuai karakter industri jasa pelabuhan yang membutuhkan penyediaan infrastruktur dan peralatan berat berbiaya mahal serta masa manfaat yang relatif panjang, maka kemampuan manajemen dalam melakukan perencanaan jangka panjang sangat diperlukan. Keputusan yang keliru mengenai kapan, apa, dan

bagaimana alat produksi ini diadakan, memberikan dampak yang sangat material serta memerlukan biaya pemulihan yang tidak sedikit. Termasuk diantaranya bagaimana struktur dan sumber pendanaan akan diperoleh juga menjadi isu krusial yang harus diperhitungkan secara matang. Penentuan struktur pendanaan ini akan menentukan besarnya biaya modal (*cost of capital*) yang harus ditanggung perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Kombinasi sumber pembiayaan yang tepat menghasilkan biaya modal paling optimal akan berdampak pada pencapaian laba usaha perusahaan yang makin besar.

4. Dampak krisis moneter tahun 1997 – 2000 terhadap *return on equity*.

Sebagai dampak krisis global yang merembet ke wilayah regional Asia, sejak Juli 1997 Indonesia juga mengalami krisis ekonomi moneter yang mengguncang sendi-sendi ekonomi dan politik nasional. Nilai tukar Rupiah terus merosot tajam, upaya Pemerintah melakukan tindakan pengetatan Rupiah telah menyebabkan suku bunga pasar uang melambung tinggi dan likuiditas perbankan menjadi kering yang menimbulkan bank kesulitan likuiditas. Memasuki 1998 keadaan ekonomi semakin memburuk, nilai Rupiah terhadap Dollar tertekan hingga Rp 16.000. Hal tersebut disebabkan pasokan barang yang menurun dengan tajam karena kegiatan produksi berkurang dan jalur distribusi terganggu karena rusaknya sentra-sentra perdagangan karena kerusuhan Mei 1998. Hingga akhir periode ini, pertumbuhan ekonomi menurun 13,7%, harga barang-barang melonjak, perusahaan-perusahaan gulung tikar, pengangguran memingkat dan beberapa fasilitas umum serta pusat perdagangan rusak berat.

Produktivitas usaha secara nasional yang menurun maupun gangguan atas jalur distribusi yang mengalami dampak langsung krisis multi dimensi yang

terjadi di beberapa wilayah ini berpengaruh terhadap kegiatan operasional pelabuhan karena berkurangnya barang yang mampu mencapai area pelabuhan. Pengurangan aktivitas operasional ini tentu saja akan berdampak pada pencapaian hasil usaha perusahaan yang merupakan fungsi dari pendapatan usaha.

Faktor lain yang juga memiliki pengaruh terhadap angka-angka laporan keuangan adalah penurunan nilai tukar mata uang asing serta peningkatan suku bunga perbankan. Hal ini dapat terjadi karena komponen pendapatan perusahaan sebagian besar diperhitungkan dalam mata uang asing dan perusahaan memiliki likuiditas sangat baik.

5. Dampak *good corporate governance* terhadap *return on equity*.

Corporate governance merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Pemahaman tentang praktik *corporate governance* terus berevolusi dari waktu ke waktu. Usaha untuk melembagakan *corporate governance* dilakukan pertama kali oleh *Bank of England* dan *London Stock Exchange* pada tahun 1992 dengan membentuk *Cadbury Committee*, yang bertugas menyusun *corporate governance code* yang menjadi acuan utama di banyak negara. Komite *Cadbury* mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*.

Peraturan Menteri BUMN nomor PER-01/M-MBU/2011 mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sebagai prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan

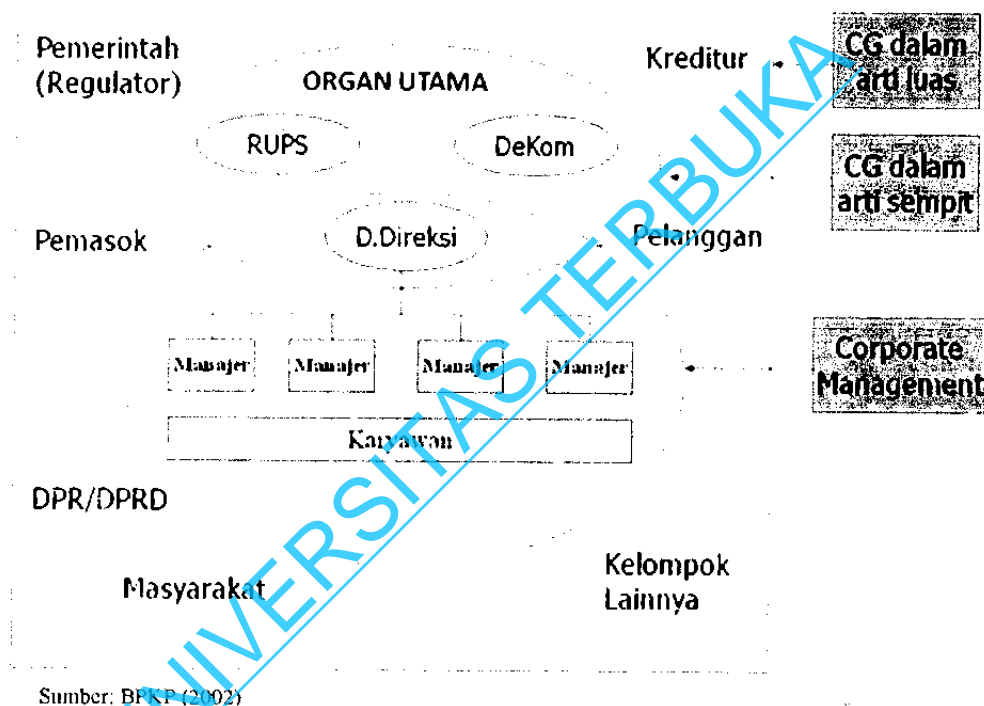
berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Sedikit berbeda dengan Keputusan Menteri BUMN nomor KEP-117/M-MBU/2002 yang mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Pada definisi terdahulu masih terdapat penekanan pada struktur yang harus dibentuk dan digunakan perusahaan sebagai satu sarana peningkatan keberhasilan usaha maupun akuntabilitas. Sedangkan dalam perkembangannya Kementerian Negara BUMN memandang perlu untuk memberi penekanan penerapan GCG bukan pada *hard factor* semata melainkan lebih pada berjalannya ‘mekanisme’ pengelolaan perusahaan.

Meminjam istilah yang dipergunakan The Indonesia Institute of Corporate Governance (IICG), *corporate governance* adalah serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Yang kemudian apabila dilakukan secara ‘baik’ akan memberikan manfaat: (i) menjaga *sustainability* perusahaan; (ii) meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan pasar; (iii) mengurangi *agency cost* dan *cost of capital*; (iv) meningkatkan kinerja, efisiensi dan pelayanan kepada *stakeholders*; (v) melindungi organ dari intervensi politik dan tuntutan hukum, dan (vi) membantu terwujudnya *good corporate citizen*.

Berdasarkan seluruh definisi tersebut di atas, *corporate governance* pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang

mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. *Corporate governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan (*mistakes*) signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Secara grafis, *corporate governance* dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: BPKP (2002)

Gambar 2.1 Skema Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip dasar GCG menjadi *guidance* atau pedoman bagi para pelaku usaha dalam mengelaborasi praktik-praktik terbaik tata kelola bagi peningkatan nilai (*valuation*) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan. Menurut *the Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD),

ada lima prinsip yang idealnya harus tercakup dalam setiap maksud penerapan *corporate governance* dalam perseroan (Tjager, 2003), yaitu:

- a. *The right of shareholders*: prinsip ini ditujukan untuk melindungi pemegang saham dalam perseroan, yang meliputi hak-hak pemegang saham dan kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam setiap rapat umum pemegang saham;
- b. *Equitable treatment for shareholders*: melalui prinsip ini *corporate governance* harus dapat menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing;
- c. *The role of stakeholders*: *corporate governance* harus mengakui hak-hak dari *stakeholders* sebagaimana yang ditetapkan hukum, dan senantiasa berupaya mendorong terciptanya kerjasama yang aktif antara perseroan dengan *stakeholders* untuk menciptakan kemakmuran, lapangan pekerjaan, dan kesinambungan usaha perseroan;
- d. *Disclosure and transparency*: adanya jaminan mengenai pengungkapan yang tepat waktu dan akurat terhadap semua hal yang material dari perseroan;
- e. *The responsibilities of the board*: kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen yang dilaksanakan oleh dewan komisaris, serta akuntabilitas dewan komisaris terhadap pemegang saham maupun perseroan.

Terkait fungsi-fungsi dan pihak-pihak yang berkepentingan memaksimalkan penciptaan nilai perusahaan sebagai entitas ekonomi maupun

entitas sosial melalui penerapan prinsip CG adalah sebagai berikut (Warsono, 2009):

- a. *Oversight* (perhatian secara bertanggungjawab) oleh dewan direksi (*boards of directors*). Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan CG selalu memperoleh perhatian utama, dan jika terjadi kegagalan harus ada pertanggungjawaban yang jelas;
- b. *Enforcement* (penegakan) oleh direktur utama (*chief executive officers*) dimaksudkan agar penerapan CG ditegakkan berdasar prinsip-prinsip dasar;
- c. *Advisory* (pemberian saran) oleh dewan komisaris (*boards of commissioners*) agar penerapan CG dilakukan berdasar pertimbangan yang hati-hati, terutama melalui keterlibatan pihak eksternal yang independen;
- d. *Assurance* (penjaminan) oleh auditor untuk mengevaluasi dan menguji penerapan CG berdasar kriteria-kriteria yang telah ditetapkan;
- e. *Monitoring* (pemantauan) oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai pihak-pihak yang terkait baik secara langsung atau tidak langsung dalam operasi perusahaan.

Dalam Peraturan Menteri BUMN nomor PER-01/M-MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN dijabarkan tentang prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut:

- a. *Transparansi* (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Pelaksanaan prinsip ini menghendaki terdokumentasinya seluruh proses pengambilan keputusan serta pengungkapan setiap aturan main, kejelasan hak dan

kewajiban, dan seluruh informasi penting yang relevan dalam laporan kepada pemangku kepentingan.

- b. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Setiap pembuat keputusan memiliki keleluasaan untuk menggunakan keahlian profesionalismenya dalam melakukan proses pengambilan keputusan.
- c. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Setiap keputusan yang diambil telah memiliki dokumentasi analisis dan landas pikir yang cukup sesuai batasan hak dan kewenangan masing-masing pihak.
- d. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kepatuhan dan pelaksanaan tanggung jawab terhadap masyarakat serta lingkungan akan memelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang karena semua pihak akan ikut serta menjaga kelangsungan perusahaan.
- e. Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Tata kelola perusahaan lebih dari sekedar proses dan prosedur, bukan hanya seperangkat peraturan atau kelengkapan struktur perusahaan. Tata kelola

perusahaan membutuhkan perubahan pikiran (*mindset*) atau paradigma yang secara mendasar mengubah budaya korporasi (nilai, norma, mental, dan perilaku korporasi). Mengutip kata Albert Einstein: “*Problems that are created by our current level of thinking can't be solved by that same level of thinking*”. Permasalahan yang ditimbulkan oleh tingkat pemikiran kita saat ini tidak dapat dipecahkan dengan tingkat pemikiran yang sama. Dibutuhkan paradigma dan keyakinan-keyakinan baru terhadap “sistem tata kelola (*governance system*)” dimana hak-hak para pemegang saham dihormati dan dilindungi, demikian pula dengan peran para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) lainnya; adanya pengungkapan (*disclosure*) yang akurat dan tepat waktu serta transparansi sehubungan dengan struktur dan operasi korporasi; kuatnya rasa tanggungjawab dewan terhadap perusahaan, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Berangkat dari perubahan pikiran dan paradigma yang didasarkan pada prinsip-prinsip GCG maka kebijakan perusahaan untuk berbagai aspek dalam korporasi – mulai dari manajemen risiko (*business risk management*), manajemen isu-isu lingkungan (*environmental issues management*), kebijakan investasi dan pendanaan (*investment and funding policy*), kebijakan dan pengembangan SDM (*HR policy and development*), dan *information technology/IT governance* harus mencerminkan praktik-praktik GCG. Di samping tercermin pada kebijakan perusahaan, penerapan prinsip-prinsip GCG juga menuntut adanya transformasi yang dimulai dari transformasi manajemen kemudian transformasi struktural dan bermuara pada transformasi budaya.

Sebagaimana ditegaskan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), tata kelola perusahaan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Tujuan utama yang ingin dicapai adalah meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang.

Penerapan tata kelola perusahaan akan memberikan setidaknya-tidaknya 4 (empat) manfaat praktis berikut:

- a. Meminimalkan *agency cost*, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk menekan biaya penggunaan sumber daya perseroan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi (penyalahgunaan kewenangan) maupun dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri;
- b. Meminimalkan *cost of capital*, yaitu biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Hal ini sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan secara baik dan sehat yang pada gilirannya menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur karena tingkat risiko perusahaan yang menurun atau terprediksi;
- c. Meningkatkan nilai saham perusahaan. Pengelolaan perusahaan yang baik akan menarik minat dan kepercayaan para investor, sehingga akan sangat membantu usaha (bisnis) korporasi. Tingginya harga saham perseroan akan

menjadi tolok ukur positif mengenai keberhasilan suatu korporasi, yang notabene adalah juga keberhasilan manajemen;

- d. Mengangkat citra perusahaan. Perilaku etis dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan seluruh komponen atau pelaku usaha, secara positif akan membentuk image atau citra positif masyarakat luas terhadap manajemen serta perusahaan.

Tata kelola perusahaan tidak terlepas dari kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal perusahaan. Praktik-praktik tatakelola perusahaan sangat dipengaruhi bentuk perusahaan, bisnis industri, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk perusahaan tersebut.

Kreatifitas dan kecermatan seluruh organ perusahaan dalam menangkap potensi pertumbuhan perekonomian nasional yang sedang menguat, mengelola pendapatan usaha melalui efisiensi biaya, memanfaatkan kekuatan struktur permodalan, serta kecermatan dalam mengantisipasi setiap gejolak perekonomian global akan menghasilkan pencapaian kinerja keuangan yang makin baik. Namun demikian, praktik-praktik korporasi yang sehat dan seharusnya dilakukan tersebut memerlukan aktivitas pengendalian yang menjamin bahwa tata kelola yang baik tersebut sungguh dilaksanakan oleh seluruh organ perusahaan.

Penataan kembali tata kelola perusahaan memberikan penguatan pada struktur keterhubungan dan proses-proses yang mengarahkan serta mengendalikan perusahaan dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan melalui penambahan nilai dan penyeimbangan antara risiko dan benefit dari setiap pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui perubahan paradigma menyangkut kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan, dan struktur

organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien dan efektif dalam mengelola risiko, serta bertanggungjawab dengan memerhatikan kepentingan *stakeholders*. Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKG) perusahaan yang telah memberikan respon dengan cara menerapkan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik akan mengintegrasikan seluruh sistem manajemen sebagai langkah penting untuk mencapai:

- a. Peningkatan kinerja perusahaan melalui prosedur pengambilan keputusan yang lebih baik, kegiatan operasi yang lebih efisien dan pemberian layanan yang lebih baik;
- b. Akses terhadap pembiayaan dengan biaya rendah bagi teknologi-teknologi baru, keahlian manajemen, pasar, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya, yang akan meningkatkan nilai perusahaan;
- c. Masyarakat investor yang puas karena perusahaan memberikan dividen dan nilai perusahaan yang lebih baik atas hasil kinerja keuangan yang meningkat;
- d. Kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang dan penciptaan nilai dengan tetap mempertimbangkan kepentingan seluruh *stakeholders*;
- e. Sumber pendapatan Pemerintah melalui privatisasi BUMN, serta pembayaran dividen dan pajak oleh BUMN.

Maka apabila seluruh aspek tata kelola yang baik telah berhasil dilaksanakan secara konsisten oleh semua organ perusahaan (pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, dan organ pendukung lainnya), pencapaian sasaran perusahaan yang terwujud dalam peningkatan indikator kinerja

operasional, kinerja keuangan, dan lebih jauh lagi menghasilkan rente ekonomi yang lebih luas. Selain itu, tata kelola yang baik akan mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan (direksi dan/atau komisaris) dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Hal ini juga (secara tidak langsung) akan meningkatkan kepercayaan investor dan berdampak positif terhadap harga saham, kemudahan mendapatkan modal maupun peluang, serta penurunan biaya modal. Dengan demikian, daya saing perusahaan akan berada/melekat pada perusahaan dan bukan hanya ditentukan oleh perkembangan pasar atau posisi/kondisi pihak pesaing.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan mengenai pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan, umumnya dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar (*listed*) di pasar modal. Ukuran peningkatan nilai pemegang saham (*shareholder's value*) dilakukan dengan melihat fluktuasi harga saham setelah dilakukannya pengumuman mengenai penerapan GCG pada perusahaan tersebut. Dalam majalah SWA (2001) disebutkan bahwa sebanyak 25 perusahaan peringkat teratas yang menerapkan GCG dengan baik, secara tidak langsung menaikkan nilai sahamnya. Secara teoritis, praktik GCG dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang akan berdampak terhadap kinerjanya.

Faccio dan Ameziane (1999) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial dan struktur dewan dapat meningkatkan kinerja

perusahaan yang diukur dengan menggunakan *return on equity* (ROE). Kang dan Asghar (2000) dalam penelitiannya membuktikan bahwa terdapat hubungan secara signifikan antara struktur kepemimpinan dewan dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan *return on investment* (ROI).

Penelitian lain mengamati unsur GCG dari sisi pandang komposisi dan jumlah komisaris, struktur modal, atau pelaksanaan *corporate social responsibility* terhadap harga saham perusahaan yang tercatat di bursa. Seluruh penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan GCG akan secara positif berpengaruh terhadap nilai saham perusahaan di bursa.

Darmawati, Khomsiyah dan Rahayu (2006), Pranata (2007) serta Eirene (2010) dalam penelitian mereka telah membuktikan bahwa variabel *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap ROE sebagai proxy atas kinerja keuangan perusahaan.

Hal tersebut berbeda dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh Wardani (2008) yang menyatakan bahwa penerapan GCG tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diprosikan dengan *return on equity* (ROE), namun berpengaruh positif terhadap Tobin's Q sebagai nilai kinerja pasar perusahaan.

Penelitian yang pernah dilakukan untuk melihat dampak penerapan GCG terhadap peningkatan kinerja dan/atau nilai perusahaan tersebut di atas, mengambil sampel perusahaan-perusahaan yang telah tercatat sahamnya di bursa. Dari berbagai penelitian yang dilakukan, belum dijumpai kajian mengenai upaya implementasi GCG yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam kurun waktu

tertentu dan dampaknya terhadap perbaikan atau peningkatan kinerja perusahaan tersebut.

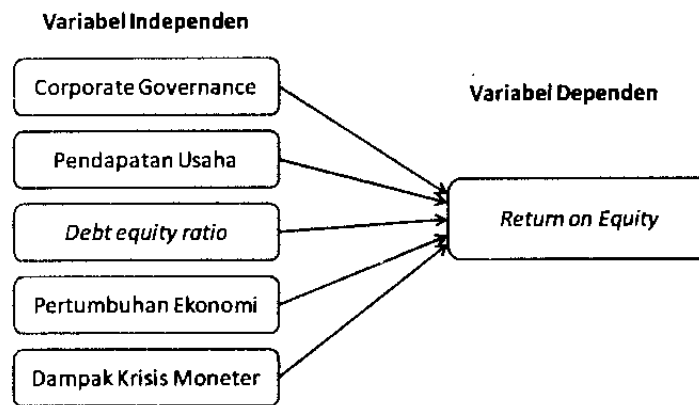
C. Kerangka Berpikir

Sebagai pintu gerbang utama arus lalu lintas barang yang menggunakan jalur transportasi laut, aktivitas operasional PT Pelabuhan Indonesia II dipengaruhi oleh pasang surutnya aktivitas ekspor impor dan perdagangan antar pulau. Aktivitas tersebut menjadi cerminan juga dari tingkat perekonomian nasional. Permintaan jasa kepelabuhanan merupakan sumber pendapatan utama perusahaan. Mengacu pada teori skala ekonomi, peningkatan pendapatan usaha akan memberikan peluang pencapaian efisiensi biaya yang makin baik. Demikian pula dengan struktur permodalan yang didominasi oleh jumlah modal sendiri yang lebih besar dari hutang, meminimalkan biaya bunga hutang yang harus membebani laporan rugi laba perusahaan. Selanjutnya, implementasi 5 prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam seluruh aspek penyelenggaraan perusahaan, mendorong upaya peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang, dengan logika berpikir sebagai berikut.

1. Berfungsinya pelaksanaan peran seluruh organ utama perusahaan, mulai dari pemilik modal, komisaris, dan direksi akan menggerakkan mesin organisasi perusahaan terarah pada pencapaian visi, misi dan tujuan perusahaan.
2. Pengelolaan perusahaan oleh seluruh organ secara profesional, transparan dan efisien, serta pemberdayaan fungsi dan kemandirian organ akan meningkatkan kinerja operasional yang secara langsung berdampak pada kinerja keuangan perusahaan.

3. Penerapan prinsip-prinsip GCG mendorong organ membuat keputusan dan menjalankan tindakan berlandaskan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan.
4. Peningkatan kinerja keuangan serta konsistensi penegakan implementasi sistem nilai GCG dapat meningkatkan image dan kepercayaan seluruh *stakeholders*. Tingkat kepercayaan tersebut secara bertahap akan menurunkan biaya modal (*cost of capital*) perusahaan.
5. Penurunan biaya modal serta penurunan tingkat kemungkinan kebocoran dana akibat penyimpangan (*fraud*) memiliki dampak langsung terhadap peningkatan tingkat pengembalian (*return*) setiap kegiatan investasi perusahaan. Dalam jangka pendek, hal ini akan tercermin pada peningkatan profibilitas perusahaan.

Profesionalisme seluruh organ perusahaan yang dapat berjalan karena mekanisme tata kelola antar organ yang makin efektif dan efisien memiliki dampak leverage yang sangat baik bagi peningkatan kinerja dan keberlangsungan usaha. Secara grafis hubungan pola pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka pemikiran penerapan GCG, pendapatan usaha, *debt equity ratio*, pertumbuhan ekonomi nasional, dan dampak krisis moneter terhadap kinerja keuangan

D. Pokok Bahasan

Berdasarkan hasil analisis terhadap rasio-rasio rentabilitas PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II sebelum dan sesudah dilakukan pengujian dan pengukuran capaian praktik terbaik tata kelola perusahaan, menunjukkan grafik naik turun yang tidak selaras dengan peningkatan pendapatan maupun tingkat pertumbuhan ekonomi secara makro. Maka dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah penerapan praktik-praktik GCG, yang ditunjukkan oleh hasil pengukuran dengan predikat “baik” dan makin meningkat, telah memberi manfaat bagi perusahaan berupa pendorong perilaku profesional dari seluruh organ perusahaan yang menghasilkan peningkatan kinerja keuangannya. Dengan peningkatan pendapatan usaha penyelenggaraan jasa kepelabuhanan dan dikendalikan oleh tingkat *debt equity ratio*, terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, serta dampak krisis moneter di sekitar tahun 1998/99 mampukah PT Pelabuhan Indonesia II menghasilkan pertumbuhan nilai perusahaan yang berkelanjutan berupa peningkatan *return on equity*nya?

Mengacu pada permasalahan tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, pendapatan usaha, *debt equity ratio*, dan penerapan *good corporate governance* yang dilaksanakan Pelindo II, serta dampak krisis moneter memiliki pengaruh signifikan secara parsial maupun simultan terhadap *return on equity*.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Rancangan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berupa statistik deskriptif dan statistik parametrik. Statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka pengamatan yang diperoleh, serta melakukan pengukuran pemusatan dan penyebaran untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, berguna, dan lebih mudah dipahami. Sedangkan statistik parametrik berkaitan dengan cara menguji hipotesis yang didasarkan pada asumsi observasi sampel dipilih dari populasi yang dianggap memiliki distribusi normal dan varians yang sama (Husein, 2003). Penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan apakah terdapat pengaruh penerapan *good corporate governance* (GCG), jumlah pendapatan usaha, *debt equity ratio* (DER), tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, serta variabel *dummy* dampak krisis moneter terhadap *return on equity* (ROE) Pelindo II.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Berdasarkan permasalahan dan hipotesis yang akan diuji, penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen (tidak bebas) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan berupa ROE sebagai proxy dari kesejahteraan pemegang saham. Sedangkan variabel independen penelitian ini adalah implementasi prinsip-prinsip GCG, proporsi hutang dibanding ekuitas yang dipergunakan

mendanai kebutuhan perusahaan dalam melakukan aktivitas usaha (*debt equity ratio*/DER) tahun sebelumnya dan tingkat pendapatan usaha Pelindo II, tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, serta dampak krisis moneter.

Untuk memperjelas variabel-variabel dalam penelitian ini, maka berikut adalah definisi operasional masing-masing:

1. *Return on equity* (ROE)

Return on equity (ROE) dipergunakan untuk mengukur tingkat pengembalian dari total ekuitas yang dipergunakan selama satu periode. ROE menggambarkan kemampuan modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Yang digunakan sebagai pengukur efisiensi dalam rumusan ROE adalah besarnya laba bersih dari jumlah modal sendiri (ekuitas) yang digunakan perusahaan. Jadi ROE merupakan tingkat hasil pengembalian investasi bagi pemegang saham.

Rumus untuk mendapatkan *Return on equity* adalah sebagai berikut:

$$\text{Return on equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\% \dots\dots\dots 3.1)$$

2. Pendapatan usaha

Pendapatan usaha merupakan sumber daya atau penghasilan yang diperoleh dari penyerahan produk dan/atau jasa utama perusahaan. Pendapatan usaha dicatat dan di-*summary*-kan dalam laporan keuangan perusahaan yang disajikan secara periodik. Sumber pendapatan usaha Pelindo II diperoleh dari penyerahan jasa pelayanan kapal, pelayanan barang, dan pelayanan rupa-rupa. Variabel pendapatan usaha diperoleh dari data sekunder berupa angka catatan Pendapatan

Usaha Bersih dalam laporan keuangan audited yang disajikan pada setiap akhir tahun dari tahun 1994 sampai dengan 2011.

3. Pertumbuhan ekonomi nasional

Tingkat pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian nasional secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi dikutip dari berita resmi Badan Pusat Statistik mengenai peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun berjalan dibandingkan PDB tahun lalu. Dalam rumusan matematis dinyatakan sebagai berikut:

$$g = \{(PDB_s - PDB_k) / PDB_k\} \times 100\% \dots \dots \dots 3.2)$$

$$\text{Tingkat pertumbuhan ekonomi} = \frac{\text{PDB riil tahun sekarang} - \text{PDB riil tahun lalu}}{\text{PDB riil tahun lalu}}$$

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan berdampak langsung pada lalu lintas pergerakan barang dalam cakupan domestik maupun antar negara.

4. Debt Equity Ratio tahun sebelumnya (DER_{n-1})

Rasio yang identik dengan struktur kapital ini didefinisikan sebagai komposisi antara jumlah hutang yang tercatat dalam sisi pasiva di neraca dengan jumlah modal sendiri (ekuitas). Untuk kepentingan penelitian dipergunakan rasio

hutang dibandingkan ekuitas tahun sebelumnya, dengan pertimbangan biaya modal yang menjadi konsekuensi pendanaan tersebut akan membebani pendapatan pada tahun berjalan. Pilihan mengenai komposisi hutang dengan modal sendiri yang akan memaksimalkan nilai perusahaan dipengaruhi maupun sekaligus mempengaruhi mekanisme tata kelola perusahaan.

Dalam rumusan matematis, rasio ini dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Debt equity ratio} = \frac{\text{Jumlah hutang}}{\text{Ekuitas}} \times 100\% \dots\dots\dots 3.3)$$

Dampak secara langsung pemilihan komposisi hutang dengan ekuitas ini terhadap tingkat profitabilitas berupa beban bunga hutang yang mengurangi tingkat laba periode berikutnya. Maka pada model regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini menggunakan data *debt equity ratio* (DER) tahun sebelumnya atau secara matematis digunakan data DER_{n-1} .

5. *Good corporate governance* (GCG)

GCG disini merupakan tingkat pemenuhan penerapan prinsip-prinsip GCG pada proses dan mekanisme tata kelola perusahaan dibandingkan kriteria praktik terbaik tata kelola perusahaan yang baik (*GCG Scorecard*) sesuai ketentuan Kementerian Negara BUMN. Nilai GCG diperoleh dari hasil pengujian dan penilaian yang dilaksanakan oleh lembaga independen maupun dilakukan secara mandiri oleh perusahaan, berdasarkan kriteria indikator dan parameter penerapan GCG yang ditetapkan Kementerian Negara BUMN.

Variabel GCG yang dimasukkan dalam proses pengujian diperoleh dari data sekunder hasil asesmen penerapan GCG pada periode tahun 2002 sampai dengan 2011. Sedangkan data GCG periode 1994 sampai dengan 2001

dikembangkan dari hasil pengolahan kondisi kelengkapan aspek-aspek pemenuhan GCG yang dimiliki perusahaan pada periode tersebut berdasarkan GCG *Scorecard* yang ditetapkan Kementerian BUMN.

6. *Dummy* dampak krisis moneter

Krisis keuangan yang melanda Asia pada tahun 1997an, telah menimbulkan kekacauan di berbagai aspek kehidupan di Indonesia pada sekitar tahun 1998-2000. Pada periode ini pertumbuhan perekonomian mencapai titik terendah dan menimbulkan dampak signifikan terhadap capaian kinerja perusahaan. Untuk mengetahui dampak krisis moneter pada periode tahun 1998-1999, maka dalam penelitian ini digunakan variabel *dummy*. Data *dummy* ditentukan dengan memberikan nilai 1 sebagai data tahun 1998 dan 1999, sedangkan data tahun yang lain ditetapkan dengan nilai 0.

C. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan di Pelindo II periode tahun 1994 sampai dengan 2011. Pelindo II berubah bentuk menjadi perseroan pada bulan Desember 1992. Kepemilikan saham Pelindo II masih sepenuhnya dipegang Kementerian BUMN, belum merupakan perusahaan publik dan tidak mempublikasikan laporan interimnya. Demikian pula tidak seluruh laporan keuangan audited mulai tahun 1992 sampai dengan tahun 2011 dipublikasikan. Data laporan keuangan maupun laporan tahunan yang berhasil diakses melalui manajemen Pelindo II terbatas pada laporan dari tahun 1994 sampai dengan 2011.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari data historis. Data sekunder utama yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data *return on equity* (ROE) diformulasikan dari data laba bersih dan modal sendiri yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan audited Pelindo II mulai tahun 1994 sampai dengan tahun 2011.
2. Data pendapatan usaha bersumber dari penyajian laporan laba rugi audited Pelindo II mulai tahun 1994 sampai dengan tahun 2011.
3. Data *debt equity ratio* (DER) diformulasikan dari data jumlah kewajiban dan modal sendiri yang disajikan dalam neraca audited Pelindo II mulai tahun 1994 sampai dengan tahun 2011.
4. Data pemenuhan prinsip-prinsip GCG bersumber dari data capaian pengukuran implementasi GCG yang disajikan dalam laporan hasil asesmen GCG tahun 2002 sampai dengan 2010, laporan tahunan PT Pelabuhan Indonesia II mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, serta hasil pengembangan perhitungan pencapaian parameter GCG tahun 1994 sampai dengan 2001 yang merujuk pada GCG Scorecard Kementerian BUMN.
5. Data pertumbuhan perekonomian nasional tahun 1994 sampai dengan 2011 bersumber dari publikasi data strategis yang diterbitkan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik yang diunduh dari website <http://www.bps.go.id>.

Data sekunder lain yang dipergunakan sebagai referensi dalam penelitian ini bersumber pada data internal manajemen Pelindo II, laporan tahunan PT Pelabuhan Indonesia II mulai tahun 2007 sampai dengan 2010, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang diunduh dari website <http://www.bps.go.id>, studi kepustakaan, dan dari berbagai sumber website di internet.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa kepelabuhanan, yaitu Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV. Sebagai sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Pelindo II, dengan dasar pertimbangan Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan utama terbesar di Indonesia yang menempati urutan kelima sebagai pelabuhan terbesar dan tersibuk di Asia Tenggara setelah Pelabuhan Singapura, Pelabuhan Port Kelang dan Tanjung Pelepas di Malaysia serta Pelabuhan Laem Chabang di Thailand. Pelabuhan Tanjung Priok merupakan salah satu cabang utama Pelindo II.

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data regresi linier berganda dengan bantuan program *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS 21) dalam teknik pengolahan data.

1. Statistika deskriptif

Statistika deskriptif berkaitan dengan penyajian data ROE, pertumbuhan ekonomi nasional, pendapatan usaha, DER, dan GCG secara umum, yang disajikan dalam bentuk grafik untuk memperlihatkan tren atau kecenderungannya.

2. Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, gejala multikolinearitas, dan gejala autokorelasi. Model regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan *best linear unbiased*

estimator (BLUE). Uji ini perlu dilakukan karena semua perhitungan statistik parametrik memiliki asumsi normalitas sebaran.

Uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki bentuk distribusi normal. Dalam uji normalitas ini ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik (Sarwono, 2012). Dalam analisis grafik, dilakukan dengan melihat grafik histogram dan *normal probability plot*. Sedangkan dalam analisis statistik dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov Goodness of Fit. Penafsiran data didasarkan pada hipotesis berikut:

H_0 = Data berdistribusi normal.

H_1 = Data tidak berdistribusi normal.

Dasar pengambilan keputusan adalah:

- Jika $\text{sig} > 0,05$, H_0 diterima H_1 ditolak, maka data terdistribusi normal.
- Jika $\text{sig} < 0,05$, H_0 ditolak H_1 diterima, maka data tidak terdistribusi normal.

b. Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Kemiripan antarvariabel independen dalam suatu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel

independen dengan variabel independen yang lain. Selain itu, deteksi terhadap multikolinieritas juga bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Uji multikolinieritas dilakukan dengan menghitung nilai *variance inflation factor* (VIF) dari tiap-tiap variabel independen. Apabila nilai VIF kurang dari 10 menunjukkan bahwa korelasi antar variabel independen masih bisa ditolerir (Mudrajat, 2003).

c. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain (*time series*). Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson, dimana hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai Durbin-Watson.

d. Uji heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak konstan pada regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu observasi ke observasi yang lain.

Heteroskedastisitas menggambarkan nilai hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *Studentized Delete Residual (SDRESID)* nilai tersebut. Cara memprediksi ada tidaknya heterokedastisitas pada satu model dapat dilihat dari pola gambar *Scatterplot* model. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Analisis regresi

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi, maka tahap pengujian selanjutnya adalah pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Model regresi yang digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian terbukti signifikan atau tidak, dinyatakan dengan persamaan 3.4):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 D + \varepsilon \dots\dots\dots 3.4)$$

Dimana: Y = *Return on Equity (ROE)*
 X_1 = Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional
 X_2 = Pendapatan Usaha
 X_3 = *debt equity ratio* tahun n-1 (DER_{n-1})
 X_4 = Tingkat pemenuhan hasil asesmen GCG
 D = variabel *dummy* dampak krisis moneter
 α = Konstanta
 $\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien regresi
 ε = *error*

1. Uji regresi simultan (uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional, pendapatan usaha, DER, GCG, dan dampak krisis moneter secara

bersama-sama (simultan) terhadap ROE dengan melihat nilai signifikansi F.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan Hipotesis

H_0 : tidak ada pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi nasional, pendapatan usaha, DER, GCG, dan dampak krisis moneter secara simultan terhadap ROE.

H_a : terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi nasional, pendapatan usaha, DER, GCG, dan dampak krisis moneter secara simultan terhadap ROE.

b. Menentukan tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,05 ($\alpha = 0,05$).

c. Membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} .

Nilai F_{hitung} dapat dicari dengan rumus:

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1 - R^2) / (N - k)} \dots\dots\dots 3.5)$$

Dimana:

1) Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$, variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

2) Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$, variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

d. Menentukan nilai koefisien determinasi, dimana koefisien ini menunjukkan seberapa besar variabel independen pada model yang digunakan mampu menjelaskan variabel dependennya.

2. Uji regresi parsial (uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel independen: tingkat pertumbuhan ekonomi nasional,

pendapatan usaha, *debt equity ratio*, pemenuhan prinsip-prinsip GCG, dan dampak krisis moneter, secara parsial terhadap variabel dependen yaitu ROE.

Langkah-langkah pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05.
- b. Membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka H_a diterima.

Nilai t_{hitung} dapat dicari dengan rumus:

$$t_{hitung} = \frac{\text{Koefisien Regresi}}{\text{Standar Deviasi}} \dots\dots\dots 3.6)$$

- 1) Bila $-t_{tabel} < -t_{hitung}$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, variabel independen secara individu tak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $-t_{hitung} < -t_{tabel}$, variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen.

3. Koefisien determinasi R^2

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh variasi variabel independen berpengaruh terhadap variasi variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dicari dengan rumus:

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = 1 - \frac{\sum e_i^2}{\sum Y_i^2} \dots\dots\dots 3.7)$$

Nilai koefisien determinansi R^2 yang kecil (mendekati 0) menunjukkan kemampuan variasi variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen rendah. Sedangkan nilai R^2 mendekati 1 menunjukkan variasi variabel independen yang memiliki kemampuan tinggi dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Deskripsi Data Obyek Penelitian

1. Gambaran umum PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II

Cikal bakal PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II tidak bisa dilepaskan dari keputusan Pemerintah Republik Indonesia yang membentuk Perusahaan Negara (PN) Pelabuhan I hingga Pelabuhan VIII untuk mengelola pelabuhan di seluruh Indonesia, pada tahun 1960. Keputusan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1960 tentang pengelolaan pelabuhan umum yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP). Dalam perkembangannya, pemerintah mulai memisahkan aspek operasional dan komersial yang ada dalam pengelolaan pelabuhan. Sejak tahun 1964, Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) yang terdiri dari PN Pelabuhan I hingga PN Pelabuhan VIII hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan aspek komersialnya saja. Adapun aspek operasional pelabuhan dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah yang disebut Administrator Pelabuhan (Adpel).

Seiring berjalannya waktu, pemerintah kembali membuat peraturan baru dalam hal pengelolaan pelabuhan. Pada tahun 1983, BPP diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum). Konsekuensinya, BPP hanya mengelola pelabuhan umum yang diusahakan saja. Sedangkan pengelolaan pelabuhan umum yang tidak diusahakan dilakukan langsung oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan. Melalui keputusan itu, Pemerintah

juga sekaligus menyederhanakan jumlah institusi yang mengurus pelabuhan umum yang diusahakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1983 juncto PP No 5 tanggal 5 Februari 1985, Perum Pelabuhan dibagi menjadi empat wilayah operasi, termasuk salah satunya Perum Pelabuhan II. Keempat Perum itu merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia. Namun, status itu pun kembali direvisi. Pada tahun 1992, keempat Perum itu diubah bentuk badannya menjadi PT Pelabuhan Indonesia I sampai IV (Persero). Nama Perum Pelabuhan II pun otomatis menjadi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Secara umum Pelindo II melayani lalu lintas kunjungan kapal, arus barang, arus peti kemas, dan arus penumpang. Sedangkan produk jasa layanan utamanya adalah:

- 1) Pelayanan jasa kapal, merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan, meliputi pelayanan: jasa labuh, tambatan dermaga umum, pemanduan kapal dan penundaan kapal.
- 2) Pelayanan jasa barang, merupakan pelayanan bongkar muat mulai dari kapal hingga penyerahan ke pemilik barang yang meliputi: dermaga umum, gudang penumpukan, dan lapangan penumpukan.
- 3) Pelayanan terminal, merupakan penyediaan dan pelayanan area terminal yang meliputi bongkar muat barang dan bongkar muat petikemas.
- 4) Pelayanan petikemas terminal, merupakan pelayanan bongkar muat peti kemas mulai dari kapal hingga penyerahan ke pemilik barang yang meliputi: operasi kapal dan operasi lapangan.

Menurut Anggaran Dasar Perusahaan, kantor pusat PT Pelabuhan Indonesia II berkedudukan di Jakarta. Perusahaan memiliki wilayah operasi di 10 propinsi dan mengelola 12 pelabuhan yang diusahakan yaitu:

- 1) Pelabuhan Teluk Bayur di Propinsi Sumatera Barat,
- 2) Pelabuhan Jambi di Propinsi Jambi,
- 3) Pelabuhan Boom Baru Palembang di Propinsi Sumatera Selatan,
- 4) Pelabuhan Bengkulu di Propinsi Bengkulu,
- 5) Pelabuhan Panjang di Propinsi Lampung,
- 6) Pelabuhan Tanjung Pandan dan Pelabuhan Pangkal Balam di Propinsi Bangka Belitung,
- 7) Pelabuhan Banten di Propinsi Banten,
- 8) Pelabuhan Tanjung Priok dan Sunda Kelapa di Propinsi DKI Jakarta,
- 9) Pelabuhan Cirebon di Propinsi Jawa Barat, serta
- 10) Pelabuhan Pontianak di Propinsi Kalimantan Barat.

Perseroan juga memiliki tiga anak perusahaan, satu perusahaan afiliasi, dua sub unit bisnis dan satu kerja sama operasi (KSO). Ketiga anak perusahaan tersebut adalah PT Rumah Sakit Pelabuhan (PT RSP), PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI), dan PT EDI Indonesia. Perusahaan afiliasi yaitu PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT). Sedangkan kedua sub unit bisnis tersebut adalah Tanjung Priok Car Terminal (TPT) dan Pusat Pelatihan Kepelabuhanan (PPK). Adapun KSO adalah Terminal Petikemas Koja (TPK Koja).

Dalam menjalankan operasi/kegiatan usaha, Perusahaan mengadakan Kerja Sama Mitra Usaha/KSMU dengan beberapa mitra usaha dari pihak swasta seperti

kerja sama operator terminal, kapal tunda, dan pengelolaan gudang-gudang pelabuhan. Selain aktif menjalankan kegiatan pengelolaan pelabuhan, Perusahaan juga berusaha di bidang lain yang relevan seperti menyewakan tanah, bangunan dan fasilitas pendukung lain yang diperlukan dalam kegiatan kepelabuhanan.

2. Deskripsi data obyek penelitian

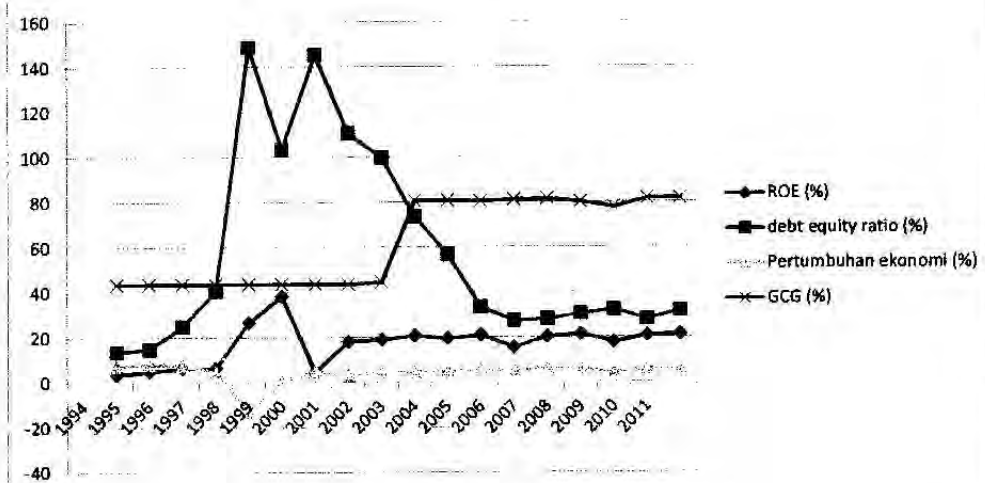
Berdasarkan hasil analisis deskripsi statistik, berikut dalam Tabel 4.1. dideskripsikan data masing-masing variabel yang telah diolah dilihat dari jumlah sampel, nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, serta standar deviasi dari masing-masing variabel.

Tabel 4.1 Statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROE	18	3.51	38.32	17.0283	8.93666
GCG	18	43.60	81.58	62.1222	18.96388
DER _(n-1)	18	12.00	148.76	56.8722	45.18021
Pendapatan	18	314	4428	1482.11	1072.644
Growth	18	-13.13	8.21	4.3833	4.68838
Dummy	18	0	1	.11	.323
Valid N (listwise)	18				

Sumber: Data sekunder diolah

Sedangkan secara grafis, variabel penelitian ROE, nilai pemenuhan GCG, DER, pendapatan usaha, dan pertumbuhan perekonomian nasional dapat digambarkan dalam gambar 4.1 berikut:



Sumber: data diolah.

Gambar 4.1 ROE, DER, GCG, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Usaha

Data *Return on Equity* yang terkecil dapat diketahui adalah 3,51% pada tahun awal 1994 dan capaian terbesar adalah 38,32% yang berhasil diperoleh pada tahun 1999, dengan nilai rata-rata sebesar 17,0283% dan standar deviasi 8,9366%. Angka standar deviasi yang lebih kecil dari nilai mean-nya ini menunjukkan simpangan data yang relatif kecil. Dengan tidak besarnya simpangan data, menunjukkan bahwa data variabel ROE dapat dikatakan cukup baik.

Data capaian GCG terendah adalah 43,60% yang terjadi sebelum perangkat kelengkapan GCG disusun yaitu mulai tahun 1994 sampai dengan 2001.

Sedangkan data tertinggi terdapat pada capaian tahun 2011 sebesar 81,58%, yang berarti bahwa tingkat pemenuhan implementasi prinsip-prinsip GCG makin menunjukkan trend yang semakin baik. Angka rata-rata data capaian adalah 62,12% dengan nilai standar deviasi 18,96% yang dapat diartikan peningkatan angka capaian pemenuhan prinsip-prinsip cukup stabil mengikuti pola linier.

Tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia pernah mencapai nilai terendah dengan angka negatif 13,13% pada tahun 1998 dan sangat tinggi dengan nilai maksimal 8,21% yang dicapai tahun 1995. Nilai rata-rata pertumbuhan menunjukkan angka 4,38%, serta simpangan data yang relatif cukup tinggi 4,688% yang lebih tinggi dari angka rata-ratanya.

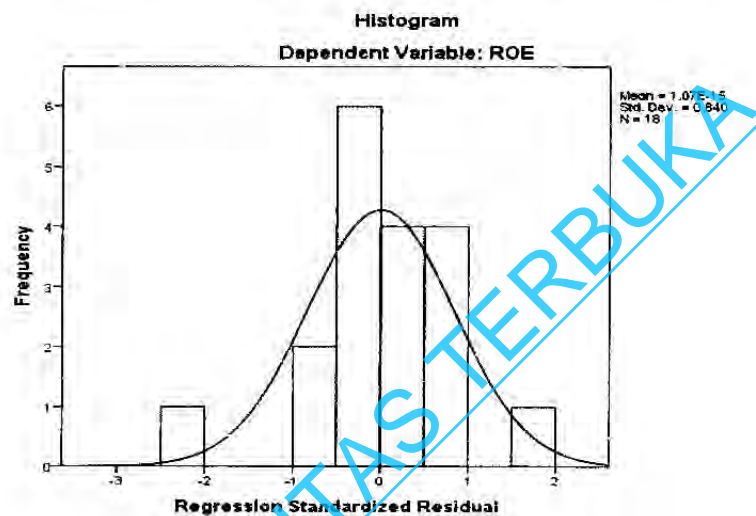
Nilai rata-rata jumlah pendapatan usaha Pelindo II adalah sejumlah Rp 1.482 milyar. Nilai simpangan baku cukup rendah jauh dibawah angka mean-nya yaitu sebesar Rp 1.072 milyar. Jumlah pendapatan usaha yang terendah sebesar Rp 314 milyar pada tahun 1994 sedangkan total pendapatan usaha dalam jumlah terbesar yang dapat diperoleh adalah sejumlah Rp 4.428 milyar selama tahun 2011. Sementara rasio perbandingan antara total hutang dengan ekuitas secara rata-rata adalah 57,9778% dengan simpangan yang relatif rendah di bawah nilai mean-nya sebesar 44,25154%. Rasio terkecil yang terlihat dari sumber data tersebut adalah 13,78% yang terjadi di tahun 1994. Sedangkan data yang menunjukkan nilai kewajiban berupa hutang yang melebihi jumlah ekuitas terjadi pada tahun 1998 dengan rasio sebesar 148,76%.

B. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan terdistribusi normal serta telah bebas dari masalah multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

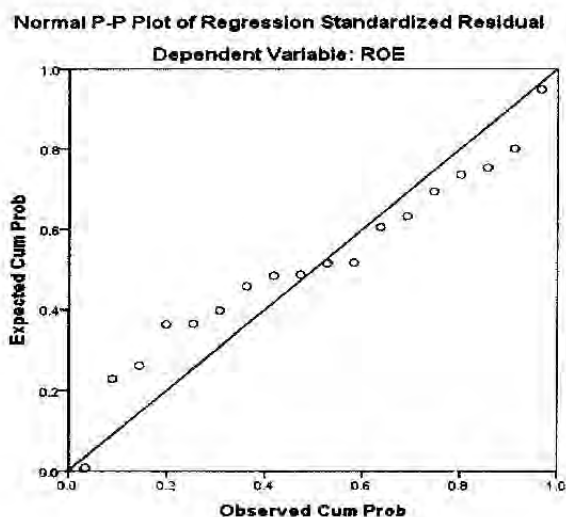
1. Uji Normalitas

Pengujian menggunakan analisis grafik histogram memperlihatkan data terdistribusi normal sebagaimana diperlihatkan dalam gambar 4.2:



Gambar 4.2 Grafik Histogram

Sedangkan uji normalitas dengan menggunakan *normal probably plot of standardized residual*, memperlihatkan titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penyebaran data ROE mendekati normal atau memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 4.3 Normal probably plot of standardized residual

Pengujian normalitas data secara analisis statistik dilakukan dengan menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov*, yang menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		ROE
N		18
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	17.0283
	Std. Deviation	8.93666
	Absolute	.204
Most Extreme Differences	Positive	.200
	Negative	-.204
Kolmogorov-Smirnov Z		.864
Asymp. Sig. (2-tailed)		.444

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder diolah

Hasil pengolahan data dalam tabel 4.2 menunjukkan nilai *asymptotic significance* 0,444 yang berarti data berdistribusi normal.

2. Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Uji multikolinieritas dilakukan dengan menghitung nilai *variance inflation factor* (VIF) dari tiap-tiap variabel independen. Berikut adalah hasil dari uji multikolinieritas menggunakan nilai tolerance dan *variance inflation factor* (VIF) yang diolah dengan menggunakan *software* SPSS 21.

Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
GCG	.389	2.572
Pendapatan	.418	2.390
DER _(n-1)	.871	1.148
Growth	.326	3.064
Dummy	.297	3.365

a. Dependent Variable: ROE

Sumber: Data sekunder diolah

Dari tabel 4.3 tersebut di atas dapat diketahui bahwa semua variabel independen memiliki nilai *Tolerance* di bawah 1 dan nilai VIF jauh di bawah angka 10. Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan tidak adanya masalah multikolinier. Kesimpulan ini didukung dengan hasil koefisien korelasi antar variabel seperti pada tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.4
Coefficient Correlations^a

Model		Dummy	Pendapatan	DER	GCG	Growth
1	Correlations					
	Dummy	1.000	-.018	-.191	.158	.798
	Pendapatan	-.018	1.000	.097	-.736	.052
	DER	-.191	.097	1.000	.039	-.055
	GCG	.158	-.736	.039	1.000	-.011
	Growth	.798	.052	-.055	-.011	1.000
1	Covariances					
	Dummy	18.609	-8.553E-005	-.015	.044	.977
	Pendapatan	-8.553E-005	1.201E-006	1.911E-006	-5.189E-005	1.630E-005
	DER	-.015	1.911E-006	.000	4.468E-005	.000
	GCG	.044	-5.189E-005	4.468E-005	.004	.000
	Growth	.977	1.630E-005	.000	.000	.081

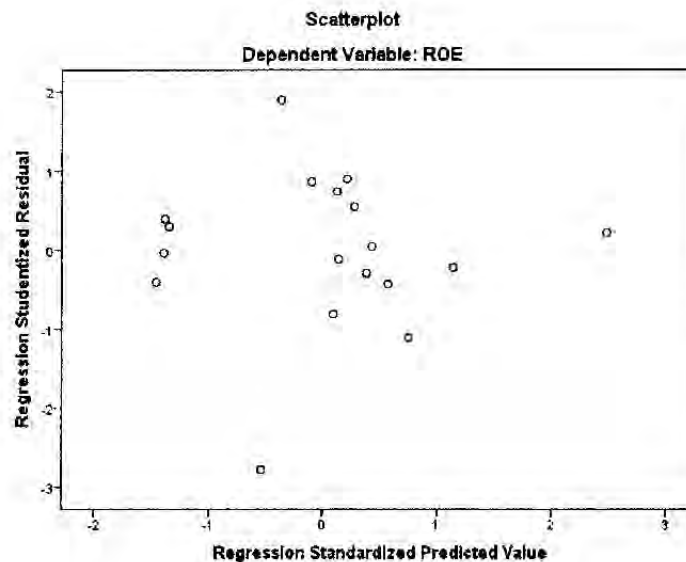
a. Dependent Variabel: ROE

Sumber: Data sekunder yang diolah

Melihat besaran (koefisien) korelasi antar variabel di atas, tampak korelasi masih di bawah 95%, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik *scatterplot* ditunjukkan pada gambar 4.4:

Gambar 4.4 Grafik *Scatterplot*

Dari grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat nilai uji Durbin-Watson yang ditunjukkan dalam Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Uji Durbin-Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.956 ^a	.913	.877	3.13550	2.220

a. Predictors: (Constant), Dummy, Pendapatan, DER, GCG, Growth

b. Dependent Variabel: ROE

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Berdasar hasil analisis regresi diperoleh nilai hitung Durbin Watson sebesar 2,220. Mengacu pada Ghozali (2011), model regresi dalam penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi karena nilai Durbin-Watsonnya berada di antara d_u dan $4-d_u$. Durbin-Watson berada di daerah 'tidak ada autokorelasi'. Dengan demikian, model ini layak untuk digunakan dalam memprediksi ROE berdasar masukan tingkat pemenuhan prinsip-prinsip GCG, pendapatan usaha, DER, tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, dan variabel *dummy*.

C. Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi dipakai untuk mencari besarnya hubungan dan juga menentukan besarnya pengaruh variabel independen, yaitu penerapan *good corporate governance*, pendapatan usaha, *debt equity ratio*, tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan variabel *dummy* yang merupakan variabel independen terhadap variabel dependen ROE. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan *Software SPSS Versi 21*.

1. Uji pengaruh simultan (Uji F)

Uji pengaruh simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi secara signifikan variabel dependen. Hasil pengujian pengaruh simultan dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.6 Uji simultan antara variabel independen dengan variabel dependen

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1239.710	5	247.942	25.220	.000 ^b
Residual	117.976	12	9.831		
Total	1357.686	17			

a. Dependent Variable: ROE

b. Predictors: (Constant), Dummy, Pendapatan, DER_(n-1), GCG, Growth

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari hasil pengujian hipotesis terlihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 25,220 dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yaitu sebesar 3,11 dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi bahwa terdapat hubungan signifikan antara variabel dependen (ROE) dengan semua variabel independen (GCG, Growth, Pendapatan, DER_(n-1) dan dummy) secara bersama-sama. Atau dengan kata lain, penerapan GCG, pendapatan usaha, DER, pertumbuhan ekonomi nasional, dan dampak krisis moneter secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROE.

2. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menjelaskan proporsi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen secara bersamaan (*goodnes of fit*).

Tabel 4.7 Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.956 ^a	.913	.877	3.13550	2.220

a. Predictors: (Constant), Dummy, Pendapatan, DER, GCG, Growth

b. Dependent Variable: ROE

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.6 di atas, diperlihatkan nilai R^2 sebesar 0,913. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran variabel independen bisa menjelaskan 91,3% terhadap variasi variabel dependen. Sedangkan sisanya sebesar 8,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model persamaan regresi.

3. Uji signifikansi parameter individual (t test)

Keandalan model regresi sebagai alat estimasi ditentukan oleh signifikansi parameter-parameter dalam model yaitu koefisien regresi. Uji signifikansi parameter individual dilakukan dengan statistik t (uji t). Hasil perhitungan parameter individual t statistik dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Pengujian Parameter Individual

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-9.021	3.790		-2.380	.035
Growth	.220	.284	.115	.773	.454
Pendapatan	.002	.001	.257	1.951	.075
DER_{t-1}	.082	.018	.416	4.563	.001
GCG	.236	.064	.502	3.675	.003
Dummy	22.988	4.314	.832	5.329	.000

a. Dependent Variable: ROE

Sumber: Data sekunder diolah

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja keuangan (ROE) dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, pendapatan usaha, *debt equity ratio*, tingkat pemenuhan prinsip-prinsip GCG, dan

variabel *dummy* dampak krisis moneter dengan persamaan matematis sebagai berikut:

$$Y = -9,021 + 0,220 X_1 + 0,002 X_2 + 0,082 X_3 + 0,236 X_4 + 22,988 D + \varepsilon \quad \dots 4.1)$$

Dimana: $Y = \text{Return on Equity (ROE)}$

$X_1 = \text{Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional}$

$X_2 = \text{Pendapatan usaha perusahaan}$

$X_3 = \text{debt equity ratio tahun } n-1 \text{ (DER}_{n-1}\text{)}$

$X_4 = \text{Tingkat pemenuhan GCG}$

$D = \text{dampak krisis moneter (variabel } \textit{dummy}\text{)}$

$\varepsilon = \text{error}$

Dari persamaan di atas dapat diterjemahkan sebagai berikut:

a. Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional (*Growth*)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi nasional (*Growth*) secara parsial terhadap kinerja keuangan ROE. Koefisien regresi tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,220. Hal ini menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan ROE. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi nasional meningkat 1% dengan asumsi variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*), maka kinerja keuangan ROE akan mengalami peningkatan sebesar 0,22%. Probabilitas menunjukkan angka lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,454. Artinya variasi variabel pertumbuhan ekonomi nasional secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan ROE. Sedangkan arah koefisien dari variabel menunjukkan arah yang positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel

pertumbuhan ekonomi nasional (*Growth*) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan ROE.

b. Pendapatan usaha perusahaan (Pendapatan)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan usaha (Pendapatan) secara parsial terhadap kinerja keuangan ROE. Koefisien regresi pendapatan usaha sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan perolehan pendapatan usaha mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan ROE. Apabila pendapatan usaha dalam suatu tahun meningkat 1 milyar dengan asumsi variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*), maka kinerja keuangan ROE akan meningkat sebesar 0,002%. Probabilitas menunjukkan angka lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0375. Artinya variasi variabel pendapatan usaha secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan ROE, dengan arah koefisien dari variabel capaian pendapatan usaha menunjukkan arah positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan usaha (Pendapatan) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan ROE.

c. *Debt equity ratio* tahun n-1 (DER_{n-1})

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *debt equity ratio* tahun n-1 (DER_{n-1}) secara parsial terhadap kinerja keuangan ROE. Koefisien regresi *debt equity ratio* sebesar 0,082. Hal ini menunjukkan tingkat *debt equity ratio* mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan ROE. Apabila tingkat *debt equity ratio* tahun lalu meningkat 1% dengan asumsi variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*), maka kinerja keuangan ROE akan meningkat sebesar 0,082%. Probabilitas menunjukkan angka lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar

0,001. Artinya variasi variabel *debt equity ratio* (periode $n-1$) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan ROE, serta arah koefisien dari variabel menunjukkan arah positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel *debt equity ratio* $n-1$ (DER_{n-1}) secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan ROE.

d. Tingkat pemenuhan prinsip-prinsip GCG (GCG)

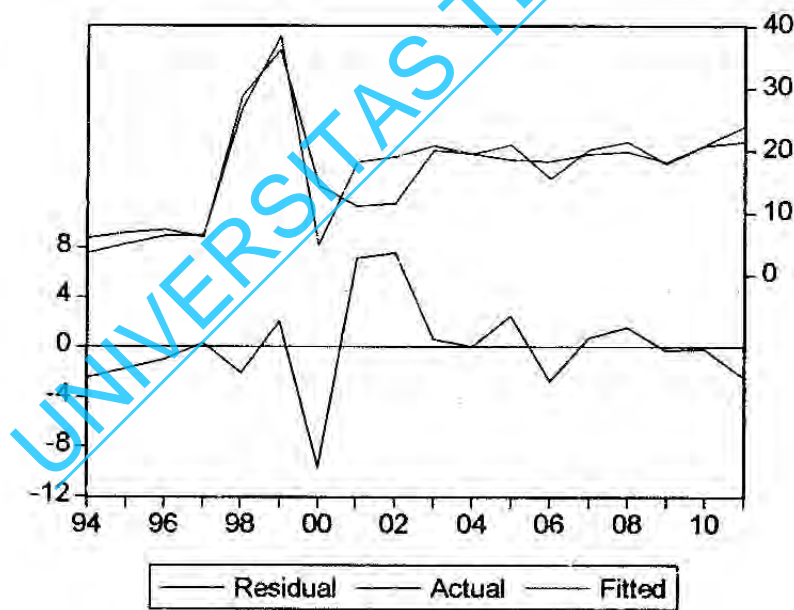
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pemenuhan prinsip-prinsip GCG (GCG) secara parsial terhadap kinerja keuangan ROE. Koefisien regresi pemenuhan prinsip-prinsip GCG sebesar 0,236. Hal ini menunjukkan tingkat pemenuhan prinsip-prinsip GCG mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan ROE. Apabila tingkat capaian pemenuhan prinsip-prinsip GCG meningkat 1% dengan asumsi variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*), maka kinerja keuangan ROE akan meningkat sebesar 0,236%. Probabilitas menunjukkan angka lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,003. Artinya variasi variabel pemenuhan prinsip-prinsip GCG secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan ROE. Sedangkan arah koefisien dari variabel menunjukkan arah yang positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pemenuhan prinsip-prinsip GCG (GCG) secara parsial dan signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan ROE.

e. Variabel *dummy* dampak krisis moneter

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh krisis moneter di Indonesia yang terjadi di sekitar tahun 1998 terhadap kinerja keuangan ROE perusahaan. Koefisien regresi *dummy* sebesar 22,988. Hal ini menunjukkan

kondisi dampak krisis moneter mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan ROE. Apabila terjadi krisis yang mempengaruhi ekonomi Indonesia dengan asumsi variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*), maka kinerja keuangan ROE akan meningkat sebesar 22,988%. Probabilitas menunjukkan angka signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Artinya variasi variabel *dummy* secara parsial memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja keuangan ROE. Sedangkan arah koefisien dari variabel menunjukkan arah yang positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi dampak krisis moneter secara parsial signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan ROE.

Model persamaan regresi yang dihasilkan tersebut, dapat digambarkan secara grafis sebagai berikut:



Gambar 4.5 Grafik Model Persamaan Regresi

Gambar 4.5 di atas menunjukkan arah model persamaan (grafik warna hijau) mengikuti nilai aktual ROE (ditunjukkan dengan grafik berwarna merah) dengan pergerakan tingkat residual yang tidak terlalu signifikan. Maka berdasarkan gambaran tersebut, model persamaan regresi yang dipergunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan kondisi riil yang terjadi.

D. Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis bahwa implementasi prinsip-prinsip GCG secara bersama-sama dengan faktor tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, pendapatan usaha, *debt equity ratio*, dan variabel *dummy* memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproyeksikan dalam *return on equity* terbukti dapat diterima. Simpulan ini sejalan dengan hasil penelitian Beasley (1996), McMullen dan Randghun (1996), dan Carcello & Neal (2000) yang membuktikan penerapan prinsip GCG mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Begitu pula yang dihasilkan dari penelitian Nuswandari (2009) dengan ROE sebagai variabel dependennya, menunjukkan bahwa variabel GCG *Perception Index* (CGPI) secara positif signifikan mempengaruhi kinerja keuangan. Mengingat banyak penelitian mengenai pengaruh penerapan GCG terhadap pencapaian atau peningkatan kinerja perusahaan yang telah pernah dilakukan dan dipublikasikan selama ini mengambil sampel data yang diperoleh dari publikasi perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan relatif dikondisikan tata kelola perusahaannya melalui regulasi yang sangat ketat, maka dapat diduga bahwa mekanisme penerapan prinsip-prinsip GCG yang diindikasikan melalui nilai capaian CGPI sudah relatif baik. Namun bertentangan dengan hasil analisis model regresi yang dilakukan Supatmi (2007) yang

menyatakan bahwa hipotesis yang menyatakan *corporate governance* berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan yang diproxy dengan ROE tidak terbukti. Atau pendapat Purwani (2010) yang menyatakan *corporate governance* tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kedua penelitian ini menggunakan data *cross-section* yang diambil dari publikasi informasi atas perusahaan-perusahaan yang sudah *go public* pada periode tertentu. Dengan hanya memotret hubungan antara angka capaian pengukuran GCG dengan rasio kinerja perusahaan pada suatu saat, tentunya dapat dihasilkan berbagai kemungkinan hasil pengujian tergantung pada periode pemotretan tersebut.

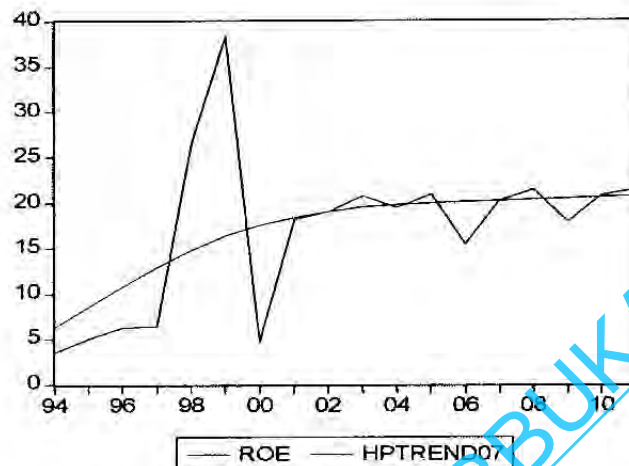
Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut di atas, pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan *data time series* dari suatu perusahaan tertentu yaitu PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II dalam periode tahun 1994 sampai dengan 2011. Keluaran hasil (*outcome*) atas implementasi GCG akan diperoleh atau terlihat dalam jangka panjang, maka dengan periode penelitian yang lebih panjang akan lebih baik membuktikan apakah kinerja perusahaan yang ingin diuji tersebut sungguh-sungguh merupakan hasil implementasi GCG atau pengaruh yang lain. Penelitian ini menguji apakah penerapan prinsip-prinsip GCG yang secara spesifik telah dilaksanakan oleh Pelindo II selama periode penelitian tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian *return on equity*-nya? Hasil pengujian secara khusus hanya menunjuk pada kondisi di perusahaan tersebut dan tidak berlaku untuk perusahaan yang lain. Maka hasil pengujian dapat dimanfaatkan secara langsung oleh perusahaan untuk mereviu pencapaian program yang telah berjalan. Berdasarkan

analisis yang dilakukan terhadap model regresi, dapat dibuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG yang telah dilaksanakan di Pelindo II, tingkat pertumbuhan perekonomian nasional, perolehan pendapatan usaha, *debt equity ratio*, serta variabel *dummy* dampak krisis moneter secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat capaian *return on equity*.

Kelemahan yang dapat diidentifikasi atas penelitian ini adalah mengenai data angka hasil asesmen GCG yang sebagian juga diperoleh dari hasil self-asesmen, bukan asesmen oleh pihak independen. Keakuratan hasil pengujian pemenuhan prinsip-prinsip GCG sangat ditentukan oleh independensi dan kompetensi asesor. Pengukuran atas parameter-parameter yang bersifat persepsi bisa saja mengalami bias dan berdampak pada keakuratan angka hasil asesmen. Maka apabila sumber data hasil penilaian atas implementasi GCG dapat diperoleh atau dilakukan secara independen, akan diperoleh hasil penelitian yang jauh lebih akurat.

Capaian kinerja perusahaan selama periode penelitian menunjukkan volatilitas yang cukup besar, utamanya pencapaian ROE selama tahun 1997 sampai dengan 2001. Pada periode berikutnya pun belum memperlihatkan gambaran yang stabil meskipun variasi yang ditimbulkan tidak terlalu signifikan. Hasil analisis atas kecenderungan pencapaian kinerja keuangan ROE memperlihatkan grafik yang meningkat meskipun peningkatan yang terjadi tidaklah terlalu besar sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.6. Capaian ROE tersebut telah dibuktikan dari hasil pengujian hipotesis, dipengaruhi secara bersama-sama oleh tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, pendapatan usaha, *debt equity ratio*, tingkat pemenuhan prinsip-prinsip GCG, serta dampak krisis

moneter dengan koefisien determinasi cukup tinggi yaitu 91,3%. Maka dalam upaya perusahaan untuk dapat meningkatkan capaian ROE tersebut dapat dilihat dari variabel yang secara parsial mempengaruhi dengan koefisien regresi cukup signifikan.



Gambar 4.6 Capaian Aktual dan Trend Return on Equity

Hasil pengujian parsial masing-masing variabel independen terhadap kinerja keuangan ROE menunjukkan bahwa pendapatan usaha, capaian pemenuhan prinsip-prinsip GCG, *debt equity ratio*, dan dampak krisis moneter berpengaruh signifikan dengan koefisien korelasi yang positif terhadap ROE. Sedangkan variabel tingkat pertumbuhan ekonomi nasional tidak terbukti memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproyeksi dengan ROE.

1. Pengaruh pertumbuhan perekonomian nasional terhadap ROE

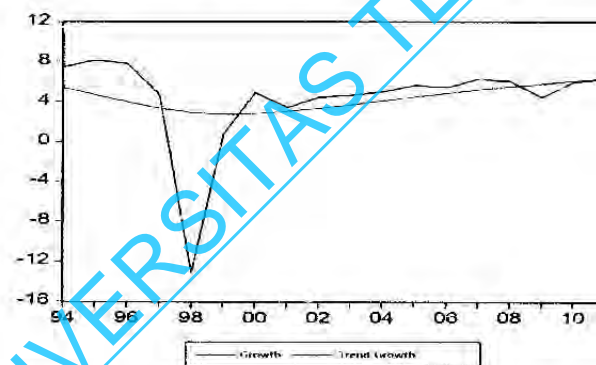
Tingkat pertumbuhan perekonomian nasional berkorelasi erat dengan volume perdagangan serta aktivitas ekspor maupun impor barang dan jasa. Aktivitas perdagangan barang baik dalam cakupan domestik, regional, maupun internasional akan menggerakkan lalu lintas barang, utamanya transportasi laut.

Peningkatan perdagangan tersebut berpengaruh terhadap permintaan jasa pelayanan kapal, bongkar muat barang, penyimpanan, dan jasa pelayanan lain yang mengikuti. Namun demikian, ternyata hasil pengujian parsial atas hipotesis bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi nasional berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan tidak terbukti dengan arah koefisien variabel positif. Dengan hasil yang diperoleh dari model regresi ini maka dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja perusahaan tidak berkorelasi dengan tingkat pertumbuhan perekonomian nasional.

Secara teoritis, peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional menimbulkan arus lalu lintas barang dan jasa yang makin tinggi, juga permintaan atas jasa kepelabuhanan yang makin meningkat pula. Pertumbuhan ekonomi belum tentu secara otomatis dialami oleh seluruh sektor dan wilayah perekonomian secara merata. Perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan kegiatan operasional atau wilayah pelayanannya sesuai kapasitas produksi yang telah disiapkan pada masing-masing cabang pelabuhan. Di samping wilayah operasional yang mampu menghasilkan keuntungan, Pelindo II masih mengemban kewajiban sebagai penyedia jasa public (*public service obligation*) untuk beberapa wilayah operasional pelabuhan. Beban investasi yang diperlukan untuk tetap menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan di daerah-daerah dimana potensi pasar tidak memadai ini, tetap menjadi beban tetap operasional yang tidak dapat dihindari serta kecil kemungkinan untuk dapat dikompensasi atau ditagihkan sebagai pelayanan jasa PSO kepada Pemerintah dan makin membebani keuangan perusahaan. Sementara perusahaan juga tidak memiliki

keleluasaan untuk membuka-tutup kegiatan operasional cabang pelabuhan sesuai perhitungan/kelayakan ekonomisnya.

Dari data statistik yang ditunjukkan dalam Tabel 4.9 diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 1996 dan sebelumnya berkisar di angka 7%. Kemudian akibat krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun drastis pada tahun 1998 hingga pada angka negatif 13%. Tetapi tumbuh kembali secara perlahan mulai tahun 1999 menjadi positif 0,79% dan merambat naik pada periode berikutnya. Namun sejak saat itu hingga kini (2012) ekonomi kita bergerak lambat dengan pertumbuhan yang rendah dan belum dapat menyamai angka 7% seperti sebelumnya. Secara grafis, kecenderungan pertumbuhan ekonomi nasional terlihat meningkat meskipun tidak terlalu signifikan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.7.



Gambar 4.7 Tingkat Aktual dan Trend Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Berbeda dengan indikator pertumbuhan ekonomi tersebut di atas, data statistik yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik mengenai jumlah kunjungan kapal serta volume ekspor dan impor barang cenderung meningkat dan tidak mengalami penurunan secara signifikan saat periode krisis. Kemudian apabila dicermati lebih lanjut nilai Pendapatan Usaha Pelindo II selama periode 1998 dan

selanjutnya, terdapat peningkatan nilai yang cukup signifikan. Peningkatan pencapaian pendapatan usaha pada tahun 1998 mencapai 70% dari tahun sebelumnya. Besarnya tingkat kenaikan nilai pendapatan usaha tersebut diduga sebagai dampak peningkatan nilai tukar mata uang asing USD ke Rupiah saat itu, dari USD 1 = Rp 2.350,00 menjadi USD 1 = Rp 16.000. Sebagian terbesar pendapatan usaha Pelindo II diperhitungkan dalam besaran USD. Gambaran perbedaan kecenderungan tersebut secara grafis dapat dilihat dalam Lampiran 4.

Tabel 4.9 Pertumbuhan Ekonomi, Kunjungan Kapal di 5 Pelabuhan Besar Indonesia, Volume Ekspor & Impor, dan Pendapatan Usaha Pelindo II

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	kunjungan kapal (Unit)	Ekspor (kg)	Impor (kg)	Pendapatan Usaha Pelindo II (Rp)
1994	7.54	-	225,343,807,583	46,143,795,282	313,936,519,675
1995	8.21	241 625	246,109,169,256	55,360,195,454	439,302,939,700
1996	7.82	161 026	214,184,335,442	58,819,380,783	469,926,316,330
1997	4.70	190 504	254,456,915,726	59,148,389,485	560,362,488,537
1998	-13.13	260 883	244,924,522,611	51,261,188,371	951,190,621,285
1999	0.79	263 608	234,966,032,988	62,240,824,887	705,906,165,473
2000	4.92	244 270	225,102,834,391	67,388,922,691	725,353,144,000
2001	3.44	246 986	272,456,624,930	65,566,789,867	1,027,606,000,186
2002	4.50	335 504	223,270,074,197	72,741,174,804	1,090,472,787,449
2003	4.72	167 976	219,566,835,175	69,705,137,458	1,206,489,699,360
2004	5.03	201 623	232,317,444,037	81,320,559,349	1,438,287,031,949
2005	5.68	335 504	258,731,545,764	83,664,535,894	1,642,410,279,291
2006	5.48	238 448	327,172,270,158	83,808,866,126	1,744,120,144,649
2007	6.30	296 000	342,773,529,783	89,935,580,813	1,968,069,723,242
2008	5.10	352 043	355,053,970,205	98,664,341,959	2,457,386,245,127
2009	4.50	239 276	378,999,100,814	91,354,405,895	2,498,700,000,000
2010	6.00	245 447	478,846,797,632	110,701,002,318	3,013,312,202,945
2011	6.30	-	582,219,779,283	128,221,634,466	4,428,196,628,375

Sumber: data statistik diolah.

Berdasarkan data volume ekspor impor tersebut di atas dapat diketahui bahwa produksi barang yang dimaksudkan sebagai pemenuhan kebutuhan ekspor maupun permintaan barang impor tidak dipengaruhi oleh penurunan tingkat perekonomian. Jumlah kunjungan kapal ke pelabuhan maupun volume barang

yang dibongkar muat di pelabuhan juga tidak mengikuti trend pertumbuhan ekonomi. Demikian pula kegiatan operasional pelabuhan lebih dipengaruhi aktivitas lalu lintas barang yang menggunakan jalur transportasi laut. Sehingga penurunan atau melambatnya pertumbuhan perekonomian nasional tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Pada tahun 1994 PT Pelindo II berhasil memperoleh pendapatan usaha sejumlah Rp 313.936.519.675,00 dengan tingkat margin atas laba bersih (*net profit margin*) 27,76% serta *return on equity* 3,51%. Bisnis utama Perusahaan adalah menyelenggarakan jasa kepelabuhanan yang terkait erat dengan lalu lintas barang melalui jalur laut. Dengan demikian peningkatan volume ekspor maupun impor barang akan memberikan pengaruh langsung terhadap peningkatan volume operasional atau permintaan jasa kepelabuhanan. Dari data statistik menunjukkan peningkatan volume ekspor dan impor mulai tahun 1994 hingga 2011 rata-rata sebesar 36,95%. Peningkatan volume aktivitas ekspor impor tersebut yang berhasil diserap PT Pelindo II melalui peningkatan lalu lintas kapal maupun aktivitas bongkar muat barang hanya menghasilkan peningkatan pendapatan usaha rata-rata sebesar 17,66%. Kurang agresifnya PT Pelindo II dalam mengoptimalkan peluang pasar yang muncul karena tingkat pertumbuhan perekonomian baik nasional, regional, maupun internasional diduga terkait beberapa kendala dan/atau kelemahan antara lain:

- 1) Tidak berfungsinya sistem perencanaan dan pengembangan usaha. Tidak ada inisiatif strategis untuk melakukan terobosan atau inovasi dari aktivitas operasional yang biasa dilakukan. Mengingat bidang usaha penyelenggaraan jasa kepelabuhanan memiliki peran vital dalam

menggerakkan dan mendorong aktivitas perekonomian nasional, keterkaitan dengan banyak pihak yang terlibat dalam lalu lintas perdagangan barang akan menentukan juga sistem operasional penyediaan jasa kepelabuhanan tersebut. Pengintegrasian berbagai sistem perijinan yang terkait lalu lintas barang serta penyediaan infrastruktur dan kemudahan akses wilayah pelabuhan yang hingga saat ini belum berhasil dikoordinasikan dengan banyak pihak terkait. Ketidaknyamanan lingkungan usaha, seperti misalnya jalan akses ke Pelabuhan Tanjungpriok yang hampir selalu macet karena jalanan buruk dan sempit, bagaimanapun diduga turut mempengaruhi pilihan pelaku usaha melakukan pengiriman barang melalui jalur laut dari pelabuhan-pelabuhan Pelindo II.

- 2) Keterbatasan fasilitas pelabuhan yang dimiliki sehingga tidak mampu mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan operasional. Peningkatan perekonomian memberikan berbagai dampak kebutuhan atas skala/kapasitas dan kemampuan teknologi pengemasan maupun transportasi. Penyediaan jasa kepelabuhanan yang masih dikelola dengan cara-cara dan pemikiran konvensional, tentunya tidak akan mampu memfasilitasi seluruh kebutuhan perkembangan tersebut. Sebagai contoh: kolam pelabuhan yang terlalu dangkal tidak memungkinkan kapal-kapal dalam ukuran besar masuk sehingga kapal tersebut akan sandar di pelabuhan Singapura dan barang diangkut dengan kapal kecil ke Indonesia.
- 3) Ketidakmampuan peralatan maupun kompetensi sumber daya untuk menangani bongkar muat barang yang memerlukan perlakuan khusus

menghambat kesempatan Perusahaan untuk menangkap peluang yang muncul dari pertumbuhan potensi pasar. Selanjutnya tingkat responsivitas Perusahaan dalam melakukan penyesuaian tersebut juga berpengaruh terhadap ketidakmampuannya merespon perkembangan pasar tersebut.

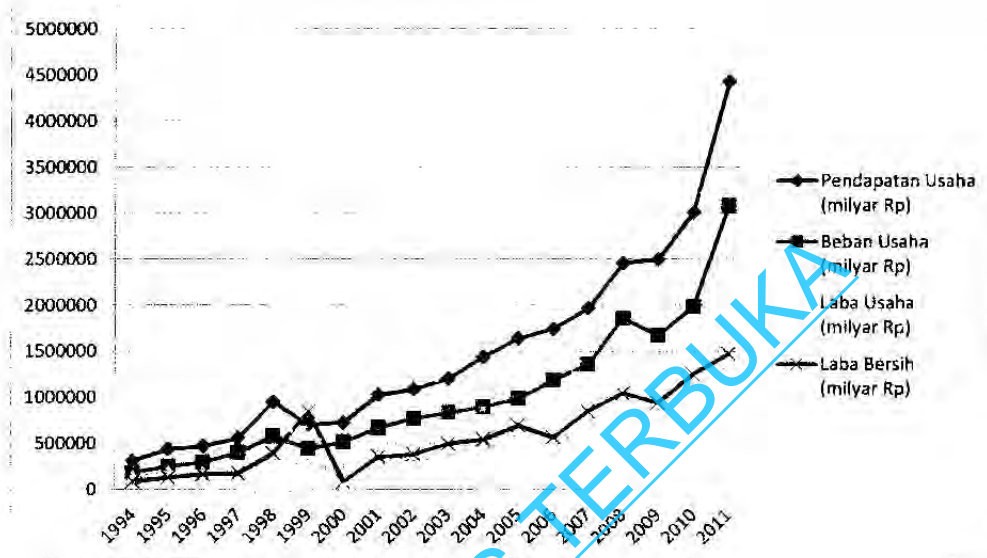
Ketidakterediaan pendanaan untuk melakukan investasi maupun keterbatasan atau tidak kreatifnya manajemen dalam mengakses sumber pendanaan eksternal berpengaruh pada perencanaan maupun eksekusi investasi fasilitas dan alat kerja. Campur tangan birokrasi Pemerintah pada masa lalu dalam hal pengambilan keputusan-keputusan investasi dan/atau strategis jangka panjang, pernah membuat PT Pelindo menghadapi tuntutan pailit karena tidak mampu membayar IMTN yang jatuh tempo (sekitar tahun 1998-2002).

2. Pengaruh pencapaian pendapatan usaha terhadap ROE

Berdasarkan hasil pengujian parsial atas hipotesis bahwa peningkatan pendapatan usaha berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan tidak dapat ditolak atau diterima. Hasil ini sejalan dengan teori skala ekonomis yang merujuk pada peningkatan keuntungan atau penurunan biaya yang berhubungan secara positif dengan tingkat ekspansi usaha atau nilai pendapatan usaha yang makin tinggi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rata-rata biaya produksi per unit turun saat jumlah output meningkat diantaranya adalah terbaginya biaya tetap dengan unit yang lebih banyak serta diperolehnya harga faktor produksi (input) yang lebih ekonomis, yang merujuk pada pengurangan biaya per unit saat ukuran fasilitas dan tingkat penggunaan input lainnya meningkat (Samuelson, 1995). Dengan terjadinya penurunan biaya per unit

tersebut maka profit margin akan meningkat, dan secara matematis akan meningkatkan pencapaian rasio rentabilitas perusahaan.

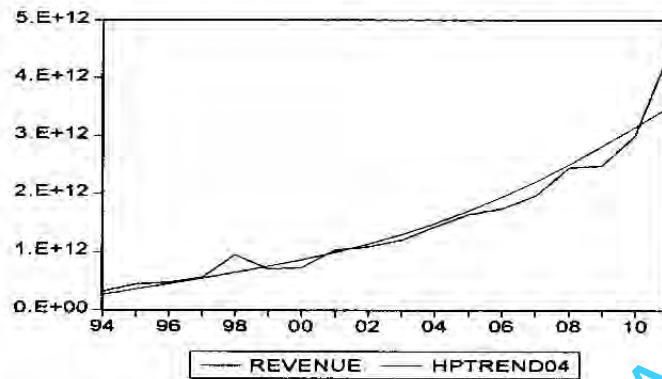
Gambaran perolehan pendapatan usaha serta pengelolaan biaya yang telah dilakukan manajemen dalam rangka menghasilkan laba dapat digambarkan dalam gambar 4.8 berikut:



Gambar 4.8 Ringkasan Laporan Laba Rugi PT Pelabuhan Indonesia II

Pada konsep awalnya, BUMN merupakan salah satu perwujudan dari peran Pemerintah di bidang ekonomi, yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun peran penyediaan barang/jasa publik untuk mendorong roda perekonomian setempat. Maka untuk BUMN yang menyandang tugas perpanjangan peran Pemerintah dalam menyediakan jasa publik, perluasan cakupan operasional maupun penentuan harga jual produk/jasa tidak hanya didasarkan pada pertimbangan bisnis semata, melainkan masih sangat kuat dipengaruhi peran Pemerintah sebagai regulator. Sehingga pada akhirnya pertumbuhan tingkat keuntungan perusahaan dapat dipengaruhi banyak hal yang

mungkin berada di luar jangkauan kewenangan manajemen. Analisis atas kecenderungan perolehan pendapatan usaha (dalam gambar 4.9 ditunjukkan dengan garis warna biru) memperlihatkan arah yang meningkat cukup signifikan.



Gambar 4.9 Capaian Aktual dan Trend Pendapatan Usaha

Visi Pelindo II adalah memberikan jasa kepelabuhanan secara andal dengan mutu pelayanan kelas dunia. Sedangkan misi yang ditetapkan adalah mewujudkan visi perusahaan melalui peningkatan realisasi komitmen perusahaan kepada mitra, pelanggan, kepentingan nasional, pemilik, masyarakat pelabuhan dan anggota perusahaan. Dari pernyataan visi dan misi perusahaan, strategi perusahaan memang masih dalam konteks mewujudkan layanan prima dan belum pada strategi yang lebih agresif untuk memperluas cakupan pasar. Strategi yang lebih mengutamakan keunggulan produk/jasa tersebut juga nampak pada komitmen yang dinyatakan sebagai berikut:

1) Kepada mitra dan pelanggan jasa kepelabuhanan:

Menyediakan dan mengoperasikan jasa pelayanan kepelabuhanan yang handal dengan mutu kelas dunia;

2) Kepada kepentingan nasional:

Meningkatkan kesehatan perusahaan secara profesional dan dapat mendorong pengembangan ekonomi nasional;

3) Kepada masyarakat pelabuhan:

Mendorong terbentuknya masyarakat pelabuhan yang kooperatif dan mempunyai rasa saling memiliki;

4) Kepada anggota perusahaan:

Mewujudkan sumber daya insani yang beriman, bermutu, optimis, bersikap melayani dan ramah, bangga kepada perusahaan dan budayanya, serta mampu memberikan kesejahteraan dan kepuasan kerja kepada karyawan.

Sebagaimana ditunjukkan gambar 4.8, pencapaian laba usaha dan laba bersih berada pada prosentase yang stabil sekitar 30% dari pendapatan usaha. Hal tersebut mengindikasikan tidak terjadinya peningkatan rasio rentabilitas mengikuti pertumbuhan pendapatan usaha, tidak terjadi kesesuaian dengan teori skala ekonomi. Pada tahun 2011 terjadi peningkatan pendapatan usaha cukup besar (46,77%), sebagai dampak arus lalu lintas barang yang meningkat serta keberhasilan kerjasama dengan otoritas lain untuk mempercepat proses custom clearance. Namun demikian, peningkatan pendapatan tersebut hanya menghasilkan peningkatan laba bersih sebesar 17,68%. Permasalahan tersebut dapat diduga bersumber dari kondisi-kondisi sebagai berikut:

- 1) Tingkat produksi yang berada di bawah skala produksi ekonomis. Banyak sebab dapat terjadi, apakah karena perencanaan alat produksi yang tidak tepat, penambahan kapasitas atau perluasan wilayah yang tidak direncanakan, ataukah target perencanaan yang tidak tercapai. Dalam

konteks Pelindo II, beberapa cabang pelabuhan harus tetap dioperasionalkan meskipun skala ekonomi yang tersedia sangat tidak memadai. Contoh: pelabuhan-pelabuhan Bengkulu, Cirebon, Jambi, Padang.

- 2) Teknologi yang digunakan tidak efisien. Pemakaian alat-alat berteknologi rendah cenderung berbiaya tinggi karena ketidakefisienannya, sementara pengalihan pada teknologi yang lebih terkini memerlukan investasi cukup besar yang belum dapat disediakan oleh perusahaan.
- 3) Ketidak-leluasaan perusahaan dalam menentukan harga jual. Mengingat penyelenggaraan jasa kepelabuhan merupakan fungsi strategis yang membawa dampak dan mengemban misi penggerak perekonomian daerah maupun nasional, maka Pemerintah mengatur cukup ketat kebijakan harga penjualan jasa/produk. Bahkan pada saat terjadi kenaikan harga komponen input yang berdampak peningkatan biaya produksi pun, perusahaan tidak memiliki keleluasaan melakukan penyesuaian harga jual produk/jasanya.
- 4) Tingkat keahlian dan produktivitas yang rendah dari sumber daya yang dimiliki. Sebagaimana umumnya yang terjadi pada BUMN yang berasal dari pengalihan instansi pemerintah menjadi badan usaha, sistem rekrutmen dan pengelolaan sumber daya manusia belum memenuhi standar dan prinsip penyelenggaraan korporasi yang sehat. Bahkan perampingan organisasi yang kemudian dilakukan masih sulit menjangkau perbaikan kualitas sumber daya manusia yang dipertahankan.
- 5) Manajemen yang kurang memiliki jiwa kewirausahaan (*sense of entrepreneurship*) yang masih dibebani berbagai kepentingan politik,

pribadi, maupun kelompok mengakibatkan terjadinya ekonomi berbiaya tinggi dalam pengelolaan perusahaan. Terdapatnya banyak biaya-biaya di luar biaya usaha, termasuk juga biaya yang berlebihan dalam rangka memperoleh dan/atau memelihara pendapatan.

Banyak faktor eksternal yang belum mampu dikendalikan melalui sistem manajemen diduga menjadi penyebab belum tercapainya efisiensi biaya atau skala ekonomi atas aktivitas operasional perusahaan.

3. Pengaruh *debt equity ratio* $n-1$ (DER_{n-1}) terhadap ROE

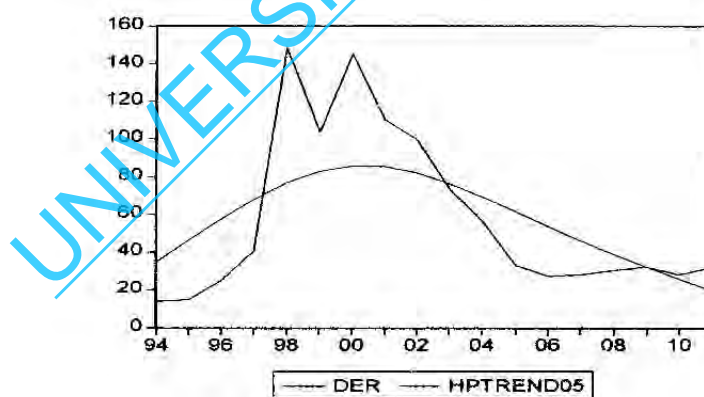
Pengujian parsial atas hipotesis menghasilkan simpulan bahwa tingkat *debt equity ratio* terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan ROE perusahaan. Struktur permodalan atau komposisi pembiayaan yang paling optimal bagi suatu perusahaan akan sangat tergantung pada analisis dan kemampuan manajemen melakukan perencanaan serta pengelolaan pembiayaan. Keputusan mengenai struktur kapital merupakan keputusan manajerial yang mencerminkan berbagai proses strategik serta menunjukkan tingkat keberanian mengambil risiko dari para manajer (Prasetyantoko, 2008). Penelitian ini memperlihatkan pengaruh signifikan penentuan komposisi hutang dan modal sendiri terhadap tingkat pencapaian kinerja keuangan perusahaan yang ditunjukkan oleh *return on equity* (ROE).

Struktur permodalan Pelindo II terdiri dari hutang (jangka pendek dan jangka panjang) serta modal saham yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah. Berdasarkan angka laporan keuangan, secara rata-rata, 85,36% kebutuhan pendanaan aktiva jangka panjang dipenuhi dari sumber modal sendiri. Bahkan modal sendiri juga menjadi sumber pembiayaan yang utama (67,29%) dalam

mendanai seluruh jumlah aktiva perusahaan. Hampir seluruh investasi infrastruktur maupun fasilitas pelabuhan dibangun terlebih dahulu oleh Pemerintah dan baru diserahkan ke perusahaan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah. Hal ini mengindikasikan pengadaan aktiva tetap pokok atau investasi utama tidak dilakukan berdasarkan perencanaan kelayakan usaha berdasarkan analisis kebutuhan.

Perusahaan hanya menanggung beban bunga yang relatif kecil dibandingkan kebutuhan investasinya. Rata-rata rasio hutang Pelindo II adalah 57,98% dibanding jumlah ekuitas, yang berarti juga hampir 2/3 kebutuhan pembiayaan/permodalan dipenuhi dengan modal sendiri dimana secara teoritis berbiaya lebih tinggi daripada hutang. Selain berbiaya modal (*cost of capital*) lebih tinggi, secara teoritis kecenderungan ini juga membatasi kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi. Namun demikian dari data laporan keuangan pada tahun 1998 s.d. 2002 Perusahaan memiliki rasio hutang dibanding ekuitas sangat tinggi pada kisaran 99,65% s.d. 148,76%. Pada periode tersebut Perusahaan menerbitkan hutang Indonesia Medium Term Notes (IMTN) sebesar 113 juta dollar AS dan Pemerintah sebagai pemilik perusahaan melepas (privatisasi) salah satu unit bisnis Pelindo II yaitu Unit Terminal Peti Kemas kepada mitra strategis asing. Pelindo II merupakan BUMN yang diprogramkan privatisasi pada Reformasi BUMN Gelombang Pertama sebagai bagian kesepakatan dengan IMF untuk membantu APBN (Abeng dalam Nugroho, 2006). Hutang IMTN tersebut dipergunakan untuk membiayai investasi pembangunan terminal peti kemas yang kemudian menjadi bagian penyertaan Pelindo II pada PT Jakarta Internasional Container Terminal (JICT). Karena kurs pertukaran mata

uang asing yang melonjak sangat tinggi akibat krisis moneter saat itu, maka nilai catat hutang IMTN di laporan keuangan (dirupiahkan) menjadi sangat tinggi pula. Pada periode tersebut tingkat pertumbuhan perekonomian nasional sedang berada pada titik terendah yaitu negative 13,13%. Maka kebijakan penerbitan hutang dalam mata uang Dolar AS tersebut terkena dampak risiko peningkatan nilai tukar mata uang asing dan beban bunga karena krisis global yang mulai terjadi sekitar tahun 1997 tersebut. Nilai hutang IMTN dan bunganya yang melonjak saat itu (sekitar tahun 2000-an), bahkan menyebabkan perusahaan dihadapkan pada ancaman dipailitkan karena ketidakmampuan melakukan pembayaran pelunasannya. Namun demikian, peningkatan jumlah beban bunga hutang yang harus ditanggung perusahaan diimbangi dengan peningkatan pendapatan selisih kurs serta pendapatan bunga di komponen lain sehingga tidak mempengaruhi pencapaian profitabilitas perusahaan. Pada tahun-tahun 1998 sampai dengan 2000 tersebut *operating profit margin* maupun *net profit margin* tetap dapat dipertahankan pada tingkat capaian sekitar 30%.



Gambar 4.10 Capaian Aktual dan Trend *Debt Equity Ratio*

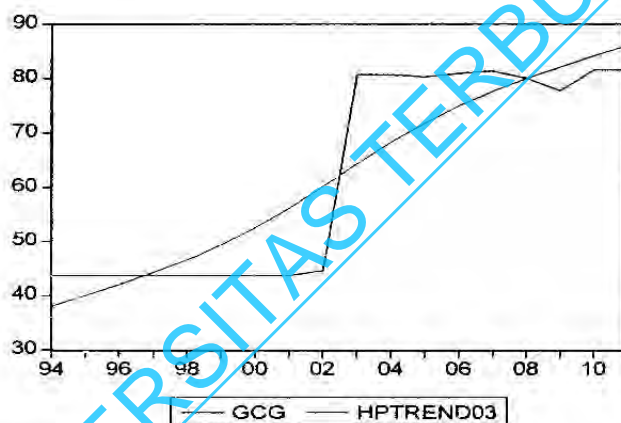
Analisis atas kecenderungan komposisi pendanaan yang bersumber dari hutang dibandingkan dengan modal sendiri Pelindo II menunjukkan selera

perusahaan makin memperkecil proporsi hutang sebagai sumber pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien regresi pengaruh *debt equity ratio* terhadap ROE adalah sebesar 0,82. Hal ini berarti setiap kenaikan 1% porsi hutang terhadap ekuitas, akan meningkatkan tingkat ROE sebesar 0,082%. Seluruh kepemilikan saham Pelindo II berada pada Pemerintah, oleh karenanya nilai pendapatan per lembar saham (*earning per share*) belum menjadi isu krusial yang menjadi perhatian Direksi maupun manajemen. Dengan demikian proporsi jumlah hutang yang relatif kecil dibandingkan jumlah ekuitas (modal sendiri) yang makin meningkat akan mengurangi jumlah riil beban bunga pinjaman yang timbul dan tidak terlampaui membebani laporan rugi laba perusahaan. Belum munculnya kepentingan untuk melakukan perencanaan pembiayaan permodalan secara lebih cermat, diduga menjadi penyebab belum terlalu besar daya ungkitnya terhadap kinerja keuangan perusahaan yang ditunjukkan dalam peningkatan rasio ROE hanya sebesar 0,082% untuk setiap 1% kenaikan DER.

4. Pengaruh pemenuhan prinsip-prinsip GCG terhadap ROE

Berdasarkan hasil pengolahan model regresi linier berganda dalam penelitian ini, dapat dibuktikan bahwa tingkat pemenuhan prinsip-prinsip GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diwakili dengan *return on equity*. Koefisien regresi sebesar 0,236 memperlihatkan bahwa peningkatan pemenuhan prinsip-prinsip GCG sebesar 1% akan meningkatkan capaian ROE sebesar 0,236%. Hal ini memperlihatkan secara umum bahwa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pelindo II untuk mengimplementasikan struktur dan proses yang mengacu pada pemenuhan prinsip-prinsip GCG telah menunjukkan hasil melalui pengaruhnya terhadap pencapaian kinerja keuangan perusahaan.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa hasil pengujian parsial maupun simultan dengan variabel independen lain atas penerapan prinsip-prinsip GCG berpengaruh secara signifikan terhadap capaian ROE sebagai ukuran kinerja keuangan perusahaan dalam rangka peningkatan nilai Pemegang Saham. Hal ini bisa berarti bahwa proses transformasi yang sudah dan sedang dilakukan di Pelindo II melalui penerapan prinsip-prinsip GCG memberikan arah kecenderungan makin baik, peningkatan kinerja keuangan perusahaan yang difokuskan pada tingkat pengembalian atas modal sendiri (ekuitas) yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah. Kecenderungan yang makin menunjukkan peningkatan ini dapat diperlihatkan dalam gambar 4.11 sebagai berikut.



Gambar 4.11 Capaian Aktual dan Trend Pemenuhan Prinsip-prinsip GCG

Pembenahan tata kelola perusahaan pada tahap awal dilakukan atas inisiatif Pemerintah sebagai organ Pemegang Saham melalui serangkaian langkah strategis Kementerian BUMN yang terkait dengan kepentingan pembenahan Pelindo II antara lain:

- 1) Menciptakan situasi/tantangan persaingan dalam penyelenggaraan jasa kepelabuhanan melalui penerbitan peraturan perundang-undangan yang

memberikan peluang kepada suatu badan usaha (swasta) mendapat ijin menyelenggarakan jasa pelayanan kepelabuhanan. Dengan ditetapkannya peraturan yang membuka kemungkinan munculnya persaingan tersebut memaksa/memacu Pelindo II untuk bergegas mengubah paradigma etos kerja dengan mulai membenahi tata kelola usahanya.

- 2) Pengalihan kewajiban pengelolaan dan pembinaan BUMN dari departemen teknis (Departemen Perhubungan) kepada Kementerian BUMN sepenuhnya. Upaya ini sangat terasa dampak positifnya bagi perusahaan, baik dari debirokratisasi pengambilan keputusan strategis perusahaan maupun berkurangnya campur tangan banyak pihak dalam pengelolaan perusahaan.
- 3) Penerbitan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governanve* pada BUMN. Peraturan ini mewajibkan BUMN menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkelanjutan serta menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya. Pelindo II termasuk dalam 16 BUMN yang diprogramkan dalam asesmen awal (*diagnostic assessment*) penerapan prinsip-prinsip GCG oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Implementasi prinsip-prinsip GCG tidak akan secara sendirian (*by itself*) menghasilkan peningkatan kinerja perusahaan, melainkan penerapan secara konsisten memungkinkan seluruh komponen sistem manajemen bergerak bahkan melipatgandakan capaian kinerja perusahaan. Agenda pertama Kementerian BUMN sebagai wakil pemilik perusahaan dalam rangka membenahan tata kelola Pelindo II adalah melakukan restrukturisasi kepemimpinan. Sebagai langkah awal

pembenahan keorganisasian melalui penggeseran prinsip keterwakilan seluruh instansi yang berkepentingan atau terkait dengan sejarah masa lalu Pelindo II dalam jajaran Direksi dan Komisaris pada isu 'profesionalisme' kandidat. Jabatan komisaris masih didominasi oleh pejabat di Kementerian BUMN, Departemen Keuangan, Departemen Perhubungan, serta TNI Angkatan Laut. Sedangkan untuk jabatan direksi dilakukan melalui mekanisme *fit & proper test* yang dilakukan terhadap kandidat dari jajaran manajemen senior Pelindo I sampai dengan IV. Melalui pemilihan direksi dan komisaris yang memenuhi kriteria profesional, mereka ini menjadi *role model* bagi pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang memenuhi penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kewajaran. Pengukuran kinerja direksi dan komisaris juga menjadi kunci keberhasilan '*tone of the top*' yang menularkan budaya profesional pada seluruh karyawan perusahaan. Pelindo II telah menggunakan mekanisme *balanced scorecard* sebagai perangkat sistem manajemen strategis perusahaan.

Pelindo merupakan BUMN yang diikutsertakan dalam reformasi BUMN gelombang pertama yang dilaksanakan masa Tanri Abeng menjabat Menteri Negara BUMN. Pada tahun 1999 Divisi Terminal Peti Kemas diprivatisasi menjadi PT Jakarta International Container Terminal (JICT). Komposisi kepemilikan sahamnya mayoritas dikuasai Hutchison Port Holding Group (HPH Group) yang menguasai 51% saham. Sisanya masih dipegang Pelindo II (48,9%) dan Koperasi Pegawai Maritim (0,1%). Penataan tata kelola perusahaan yang dilakukan pemegang saham Pelindo II difokuskan paling tidak menyangkut 3 prinsip:

- 1) Keterbukaan (*transparency*): kewajiban pelaporan kinerja perusahaan secara periodik, layak, dan tepat waktu. Disiplin pelaporan ini secara bertahap meminimalkan terjadinya kecurangan perekayasa laporan keuangan serta termonitornya kinerja manajemen dari waktu ke waktu.
- 2) Kewajaran (*fairness*): penataan sistem jenjang karir, suksesi, dan remunerasi yang dikaitkan dengan profesionalisme dan kinerja. Lingkungan kerja yang nyaman serta kepastian masa depan telah menciptakan semangat dan profesionalisme karyawan untuk menghasilkan pencapaian kinerja yang makin meningkat.
- 3) Akuntabilitas (*accountability*): prinsip dimana semua tindakan yang terjadi dalam korporasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Pendisiplinan yang dilakukan adalah kewajiban setiap pembuat keputusan melakukan analisis secara komprehensif sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Analisis yang cermat tersebut mendorong diminimalkannya pengambilan keputusan yang keliru. Dengan demikian efisiensi biaya serta optimalisasi laba dapat terjadi.

Penerapan ketiga prinsip tersebut dengan menggunakan pendekatan “kepatuhan pada peraturan” masih dirasa paling efektif dan dapat dirasakan manfaat perbaikannya dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama (Sukardi dalam Nugroho, 2006). Perkembangan sistem teknologi informasi paling tidak, dapat menunjukkan perbedaan atau peningkatan perwujudan ketiga prinsip tersebut di perusahaan. Mulai dari sistem teknologi informasi yang hanya dipergunakan sebagai sarana bantu operasional, kemudian berkembang sebagai sistem pengelolaan informasi, saat ini sedang dalam pengembangan sistem yang

memiliki kemampuan mengintegrasikan seluruh sistem di perusahaan. Tantangan ke depan adalah pengembangan *business intelligence system* sebagai perangkat untuk memonitor dan mencermati indikator risiko maupun peluang yang muncul di lingkungan bisnis perusahaan.

Peta perjalanan Pelindo II dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG secara formal dimulai tahun 2002/2003 dengan membentuk dan menyusun perangkat infrastruktur GCG sesuai ketentuan Permen BUMN Nomor KEP-117/MBU/2002. Pedoman GCG dan kelengkapan organisasi tersebut adalah sebuah instrumen “perangkat keras” yang memberi panduan bagi manajemen agar berjalan dengan baik berlandaskan prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran. Sosialisasi dan internalisasi substansi materi pedoman GCG tersebut sehingga terimplementasi dan menjadi komitmen seluruh organ perusahaan untuk secara konsisten mematuhi merupakan perjalanan panjang yang hingga saat ini masih terus ditingkatkan pemenuhannya.

Mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 pasal demi pasal, dapat diperoleh penjelasan mengenai signifikansi pengaruh penerapan prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan:

- 1) Pemegang Saham menetapkan Dewan Komisaris dan Direksi melalui sistem pemilihan dan pengangkatan (*fit & proper test*) yang transparan dan akuntabel yang mengacu pada Permen BUMN Nomor: PER-04/MBU/2009 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Mekanisme penyaringan daftar kandidat direksi Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan

Pelindo IV dilakukan secara bersama-sama dalam 1 tahapan penyaringan. Pemilihan personil yang tepat diharapkan mampu mengemban tugas dan kewajiban sesuai fungsinya dengan profesional.

- 2) Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, dan memberikan masukan kepada Direksi secara profesional. Akuntabilitas pelaksanaan fungsi ini dikendalikan melalui pengaturan rapat komisaris, rapat gabungan dengan direksi, risalah rapat, mekanisme persetujuan komisaris, serta kewajiban pelaporan kepada pemegang saham. Sebagai pihak yang tidak secara langsung bekerja menangani pengelolaan kegiatan operasional perusahaan, komisaris memiliki obyektivitas dan sudut pandang yang lebih luas dari apa yang sudah dan sedang dilaksanakan. Dengan demikian mereka akan dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada direksi.
- 3) Dewan Komisaris turut mengawasi dan memastikan implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten. Dalam rangka mendukung peningkatan pelaksanaan tugas pengawasan tersebut, komisaris memiliki perangkat komite kebijakan GCG yang secara rutin memonitor pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh manajemen.
- 4) Direksi memiliki kompetensi profesional untuk melaksanakan tugasnya dan menjalankan tugas pengelolaan perusahaan dengan itikad baik untuk kepentingan BUMN. Profesionalisme pimpinan tertinggi perusahaan merupakan lokomotif yang menggerakkan seluruh komponen menuju pencapaian tujuan perusahaan.

- 5) Direksi menyusun perencanaan strategis jangka panjang, menengah maupun tahunan secara cermat dan akuntabel. Tujuan yang telah digariskan oleh pemilik perusahaan diterjemahkan dalam tataran yang dapat dioperasionalkan ke dalam visi, misi, dan sasaran strategis perusahaan. Rencana strategis yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana perusahaan akan diarahkan, dan bagaimana sumberdaya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan harus disusun dalam jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Rencana dan sasaran strategis yang telah diformulasikan menjadi target-target terukur yang harus dicapai inilah selanjutnya akan menjadi acuan bagi semua pihak dalam jajaran manajemen.
- 6) Direksi melakukan pengelolaan risiko secara sistematis dan terencana. Untuk memastikan pencapaian target yang telah ditentukan, direksi dan seluruh jajaran manajemen harus mampu menemukannya risiko-risiko yang dihadapi pada setiap proses bisnis dan melakukan strategi mitigasi atas risiko tersebut dengan baik. Melalui kecermatan mengidentifikasi dan menganalisis kemungkinan hambatan dan/atau ancaman di periode mendatang, aktivitas mitigasi maupun pengendaliannya dapat direncanakan secara matang.
- 7) Direksi menetapkan sistem pengendalian intern yang efektif untuk memberikan jaminan yang memadai atas ketercapaian tujuan perusahaan. Secara spesifik sistem pengendalian intern yang memadai akan mampu mengamankan aset/kekayaan perusahaan, keandalan laporan keuangan,

- menciptakan efisiensi, serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Satuan pengawasan intern melaksanakan fungsinya secara konsisten dan profesional. Anggota SPI memiliki profesionalisme seorang auditor intern yang secara sistematis melakukan audit dan mengevaluasi kemampuan, efisiensi, dan kepatuhan manajemen operasional serta melakukan penilaian atas penggunaan sarana perusahaan
 - 9) Direksi menetapkan tatakelola teknologi informasi yang efektif. Pengelolaan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa informasi dan teknologi informasi yang terkait telah mendukung tujuan bisnis, sumber daya digunakan secara bertanggung jawab dan risiko terkait dikelola dengan tepat. Fokus utama pengelolaan teknologi informasi adalah penyelarasan strategis (*strategic alignment*), penyampaian nilai (*value delivery*), pengelolaan sumber daya (*resource management*), pengelolaan risiko (*risk management*), dan pengukuran kinerja (*performance measurement*). Tata kelola teknologi informasi yang baik memungkinkan perusahaan memiliki sistem informasi manajemen yang efektif guna mengarahkan aktivitas operasional pada pencapaian tujuan perusahaan.
 - 10) Laporan Keuangan Tahunan diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan Dewan Komisaris. Kemandirian auditor eksternal dari benturan kepentingan terhadap direksi dan/atau jajaran manajemen akan meningkatkan obyektivitas dalam pengungkapan ketidakwajaran pelaporan dan secara bertahap mendorong akuntabilitas manajemen.

11) Pelaksanaan pengelolaan perusahaan secara profesional. Apabila setiap personil perusahaan bekerja menggunakan kemampuan intelektualnya sesuai standar kompetensi dan nilai etis yang telah ditetapkan, maka target perusahaan diharapkan dapat tercapai. Pelaksanaan sistem manajemen terintegrasi secara konsisten dan disiplin, memberikan jaminan yang memadai atas keberlanjutan pertumbuhan nilai perusahaan.

Mencermati hasil asesmen GCG mulai tahun 2002 sampai dengan 2010 terdapat beberapa parameter yang belum mencapai tingkat pemenuhan sebagai praktik terbaik tata kelola perusahaan, yaitu antara lain:

- a. Aspek partisipasi pemegang saham: belum transparannya proses pemilihan komisaris dan direksi, lambatnya peran pemegang saham dalam merespon pasar, serta belum dilaksanakannya mekanisme penilaian kinerja individu direksi dan komisaris oleh pemegang saham.
- b. Kebijakan *good corporate governance*: aspek transparansi berupa pengungkapan komitmen perusahaan untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang sehat kepada publik belum dilaksanakan secara optimal.
- c. Peran dan proses tata kelola organ komisaris: belum optimalnya pelaksanaan peran pengawasan dalam proses penyusunan RJPP dan RKAP serta monitoring atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan, belum dilaksanakannya penilaian direksi berbasis kinerja individu, serta tidak terdokumentasikannya dinamika proses pengawasan yang dilakukan komisaris.
- d. Peran dan proses tata kelola organ direksi: belum terjadi keselarasan antara perencanaan, pengelolaan kinerja, dan sistem insentif pada berbagai

jenjang organisasi perusahaan, serta belum tersistemisasinya manajemen risiko dan manajemen kinerja.

- e. Aspek komitmen: belum terinternalisasinya nilai-nilai dasar perusahaan secara memadai diantara seluruh karyawan perusahaan.

Pengaturan atau ketentuan persyaratan penerapan GCG sesuai PER-01/MBU/2011 di atas sebagian besar merupakan *hard-factor* yang tidak terlalu sulit dipenuhi oleh BUMN sebagai bagian dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya sangat tergantung pada upaya perusahaan untuk mengisi ruang kosong dalam pemenuhan prinsip-prinsip GCG tersebut dengan *soft-factor* yang memaknai aspek *mandatory* lebih inovatif. Makin dekat tata kelola perusahaan dengan praktik-praktik terbaik sesuai prinsip-prinsip GCG, diharapkan kinerja perusahaan makin meningkat.

5. Pengaruh krisis moneter periode 1997-1999 terhadap ROE

Krisis keuangan yang melanda kawasan Asia sekitar tahun 1997-1998, yang kemudian diperburuk oleh krisis politik di Indonesia sepanjang tahun-tahun tersebut, telah menyebabkan berbagai ketidakpastian yang luar biasa. Era pasar bebas yang secara formal dimulai dengan terbentuknya World Trade Organization (WTO) di tahun 1994, segera diikuti oleh krisis keuangan di berbagai kawasan dunia hingga merambah ke negara-negara di kawasan Asia, tak terkecuali Indonesia. Sejak pertengahan Juli 1997 krisis ekonomi moneter mulai menggoncang sendi-sendi ekonomi dan politik nasional. Nilai tukar Rupiah terus merosot tajam, kebijakan pengetatan Rupiah menyebabkan suku bunga pasar uang melambung tinggi dan perbankan mengalami kesulitan likuiditas. Masyarakat

mengalami kepanikan dan terjadi penarikan dana perbankan secara besar-besaran yang sekali lagi menimbulkan kesulitan likuiditas pada seluruh sistem perbankan. Memasuki 1998 keadaan ekonomi semakin memburuk, nilai Rupiah terhadap Dollar tertekan hingga Rp 16.000. Secara umum kegiatan produksi berkurang dan jalur distribusi terganggu karena rusaknya sentra-sentra perdagangan akibat kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998. Pertumbuhan ekonomi nasional menurun hingga mencapai angka negatif 13%. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang kemudian diikuti dengan peningkatan luar biasa tingkat suku bunga tersebut telah menimbulkan kecemasan dan kepanikan dunia usaha. Kinerja dan daya saing perusahaan menurun drastis, dan hanya perusahaan yang memiliki fundamental bisnis yang kokoh saja yang mampu bertahan dan lolos dari tekanan perekonomian saat itu.

Situasi krisis tersebut mempengaruhi hampir seluruh aspek kemasyarakatan terlebih pada tahun 1998-1999. Memperhatikan hasil pengujian atas dampak krisis tersebut terhadap kinerja keuangan Pelindo II, ternyata dapat dibuktikan secara positif signifikan dampak krisis moneter tersebut mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan ROE. Dalam hal jumlah kunjungan kapal maupun volume lalu lintas barang yang dibongkar-muat di pelabuhan Pelindo II relatif tidak terdapat pengaruh yang signifikan (lihat Tabel 4.9). Namun demikian karena pada periode krisis nilai tukar mata uang asing meningkat sangat tinggi, sedangkan transaksi yang dilakukan Pelindo II dalam mata uang USD maka terdapat peningkatan nilai pendapatan usaha (dalam mata uang Rupiah) serta keuntungan selisih nilai tukar mata uang asing yang sangat material. Sementara sebagian terbesar komponen biaya yang terjadi diperhitungkan dan dibayarkan dalam mata uang Rupiah, maka

peningkatan jumlah pendapatan usaha ini secara otomatis juga telah melambungkan capaian laba usaha perusahaan.

Berdasarkan hasil pengujian model regresi terlihat bahwa dalam periode yang dipengaruhi krisis pada tahun 1998-1999 tersebut telah mempengaruhi pencapaian ROE secara positif dengan angka yang cukup signifikan yaitu 22,988%. Meski demikian peristiwa ini merupakan kejadian luar biasa yang tidak dapat dikondisikan maupun diramalkan akan atau dapat terjadi lagi.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh signifikan penerapan praktik-praktik GCG, pendapatan usaha, *debt equity ratio*, tingkat pertumbuhan perekonomian, dan dampak krisis moneter Indonesia terhadap kinerja keuangan perusahaan yang ditunjukkan pada rasio *return on equity* (ROE) yang dicapai oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan model regresi linier berganda dapat dibuktikan bahwa variabel independen penerapan praktik-praktik GCG, pendapatan usaha, dan *debt equity ratio* yang diperoleh atau dilakukan perusahaan, tingkat pertumbuhan perekonomian serta dampak krisis moneter Indonesia berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian tingkat *return on equity* yang mencerminkan penciptaan nilai terhadap tingkat kesejahteraan pemegang saham.

Koefisien determinasi yang diperoleh dari hasil pengujian sebesar 0,913 memperlihatkan bahwa 91,3% capaian ROE dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel tingkat pemenuhan prinsip-prinsip GCG, pendapatan usaha, *debt equity ratio*, tingkat pertumbuhan perekonomian nasional dan dampak krisis moneter. Sedangkan sisanya sebesar 8,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi penelitian ini.

Hasil pengujian parsial atas pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen ROE secara masing-masing menunjukkan bahwa

terdapat 4 variabel yang terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja, yaitu pendapatan usaha, nilai pemenuhan prinsip-prinsip GCG, *debt equity ratio*, dan dampak krisis moneter. Sedangkan variabel tingkat pertumbuhan ekonomi nasional tidak berpengaruh terhadap variabel dependen kinerja perusahaan.

B. Saran

Dengan memperhatikan simpulan hasil pengujian di atas maka disarankan kepada manajemen PT Pelabuhan Indonesia II untuk meningkatkan pemenuhan prinsip-prinsip GCG utamanya dalam hal sebagai berikut:

1. Kemandirian direksi dalam melakukan perencanaan produksi dalam jangka panjang serta eksekusi atas investasi yang diperlukan sehingga dapat diperoleh optimalisasi proses produksi. Terhadap aktiva tetap yang telah dimiliki sebaiknya dianalisis terlebih dahulu, hasil kajiannya diintegrasikan dengan perencanaan jangka panjang yang selanjutnya disusun tersebut.
2. Akuntabilitas dalam setiap proses pembuatan keputusan melalui keharusan melakukan analisis secara cermat atas setiap alternatif keputusan dan risikonya. Keputusan yang tepat diharapkan dapat menghasilkan efisiensi biaya dan menghindarkan beban atas kegagalan atau dampak kesalahan.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pelaku usaha, utamanya BUMN, untuk secara periodik melakukan upaya pengecekan dan pengendalian dalam rangka memastikan implementasi GCG yang dilaksanakannya telah mendorong seluruh sistem manajemen berfungsi dan

memberikan dampak kinerja serta peningkatan nilai perusahaan. Kendala terbesar melakukan penelitian terhadap perusahaan yang belum go-public adalah sumber data yang sangat terbatas, hanya berupa laporan keuangan tahunan. Maka disarankan untuk perbaikan penelitian selanjutnya adalah dengan menggunakan data yang lebih banyak, misal triwulan maupun semester sehingga diperoleh hasil yang lebih akurat. Keakuratan penelitian diharapkan menghasilkan rekomendasi yang lebih bermanfaat, utamanya untuk kepentingan '*plan-do-check-action*' PDCA peningkatan dan pengintegrasian seluruh sistem manajemen dalam kerangka tata kelola perusahaan yang makin baik.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, J. (2009). Assessing Corporate Governance in Asia, 1999-2009: What's in Store for the Next Decade? Bahan presentasi ACGA disajikan dalam *Asia's New Market Realities Chubb-APEC Seminar tanggal 7 Oktober 2009*. Singapore.
- Anonymous. (2010). Good Luck in Getting Better Corporate Governance. *The WallStreet Journal*. New York. May 18th 2010.
- Arafat, W. (2008). *How to Implement GCG Effectively: Mengungkap Horizon 8 Langkah Membumikan Sistem dan Budaya GCG*. Jakarta: Skyrocketing Publisher.
- Armstrong, P. (2010). Corporate Governance in Asia: Some Thoughts. *Journal of Corporate Governance in Asia*. Vol 7 No.1.2010.
- Arrsa, R.C. (2010) *Korupsi Cermin Kolonialisme, Kanker Demokrasi dan Optimisme Terhadap Pemberantasannya*. Dokumen diambil 12 Agustus 2012 dari situs <http://ppotoda.org/wp-content/>.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2007). *Pedoman Tata Kelola Perusahaan*. Dokumen internal Tim Pengembangan GCG BPKP. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. Dokumen yang dipublikasikan di <http://www.bps.go.id/> yang diunduh September 2009 sampai dengan September 2012.
- Bank Indonesia. *Sejarah Moneter Indonesia Periode 1997/1999*. Diunduh September 2011 dari <http://www.bi.go.id/>.
- Beasley, M.S. (1996). An Empirical Analysis of The Relation Between The Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. *The Accounting Review Volume 71, No. 4, Oktober: 443-465*.
- Carcello, J.V., Hollingsworth C.W., Klein & Neil, T.L. (2006). Audit Committee Financial Expertise, Competing Corporate Governance Mechanisms, and Earnings Management. Diunduh November 2010 dari www.ssm.com.
- Claessens, S. & Fan, J.P.. (2002). Corporate Governance in Asia: A Survey. *International Review of Finance*, 3:2, 2002: pp. 71±103.
- Cornwallis, R and Kusmanto, R. (2009). Corporate Governance in Indonesia. *Journal of Corporate Governance in Asia*. Vol 6 No. 3. 2009.
- Darmawati, D., Khomsiyah & Rahayu, R.K. (2005). Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 8(1). Januari.

- Davies, A. (2006). *Best Practice in Corporate Governance*. England: Gower Publishing Limited.
- Djalil, S.A. (2000). Good Corporate Governance. Makalah disajikan pada *Seminar Corporate Governance Universitas Sumatra Utara tanggal 28 Juni 2000*. Medan.
- Djohanputro, B. (2008). *Manajemen Risiko Korporat*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Eirene, L. (2010). Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Tesis yang tidak dipublikasikan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur*.
- Emirzon, J. (2006). Regulatory Driven Dalam Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*. 4(8).
- Erakovic, L. & Overall, J. (2008). Opening the Blackbox: Challenging Traditional Governance Theorem. *Journal of Management and Organization*. 16, 250-265.
- Faccio & Ameziane. (1999). *Managerial Ownership, Board Structure and Firm Value*. Diunduh pada November 2010 dari <http://www.m.a.lasfer@city.ac.uk>.
- Fahy, M., Roche, J. & Weiner, A. (2005). *Beyond Governance: Creating Corporate Value Through Performance, Conformance and Responsibility*. England: John Wiley & Sons.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Gitman, L.J. (1994). *Principles of Managerial Finance*. 7th ed. New York: Harper Collins College Publisher.
- Gompers, P., Ishii, J. & Metrick, A. (2003). Corporate Governance and Equity Prices. *Quarterly Journal of Economics* 118(1): 107-156.
- Gonzalez, E.T. (ed). (2007). *Best Practices in Asian Corporate Governance: A sequel to Impact of Corporate Governance on Productivity: Asian Experience*. Tokyo: The Asian Productivity Organization.
- Governance Metrics Ratings. GMI Ratings Governance Update 2005. Diunduh dari www.gmiratings.com/ pada Juli 2010.
- Guerra, J.E. (2004). The Sarbanes-Oxley Act and Evolution of Corporate Governance. *The CPA Journal, March 2004*. Diunduh dari <http://www.nysscpa.org/cpajournal/2004/304/perspectives/nv5.htm> pada Agustus 2012.

- Harford, J., Li, K. & Zhao, X. (2008). Corporate boards and the leverage and debt maturity choices. *International Journal of Corporate Governance, Vol. 1, No. 1, 2008.*
- Herwidayatmo. (2000). Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik Indonesia dalam *Usahawan no. 10 th.XXIX Oktober 2000.* 25-32.
- Hirth, R. (2005). *Corporate Governance: A Primer, The Present & Some Predictions.* Makalah yang tidak dipublikasikan.
- Husein, U. (2003). *Metode Riset Bisnis.* Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ingebretsen, M. (2004). *Why Companies Fail: 10 Alasan Besar Mengapa Perusahaan Ambruk, dan Bagaimana Menjaga Perusahaan Anda Tetap Kuat dan Kokoh.* Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Institutional Shareholder Services. (2006). *Post Season Report 2006* diunduh September 2010 dari <http://www.issgovernance.com/>
- Johnson, R.A. & Greening, D.W. (1999). The Effects of Corporate Governance and Institutional Ownership Types of Corporate Social Performance. *Academy of Management Journal, vol. 42 no. 5 October 1999.* p.564-576.
- Johnson, S., Boone, P., Breach, A. & Friedman, E. (2000). Corporate Governance in The Asian Financial Crisis. *Journal of Financial Economics 58 (2000).* 141-186.
- Kang & Asghar. (2000). Board Leadership Structure and Firm Performance, Blackwell Publishing. Diunduh November 2010 dari <http://www.aslkang@ntu.edu.sg>
- Kementerian Negara BUMN. (2002). Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMN.
- Kementerian Negara BUMN. (2011). Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/M-MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
- Kementerian Negara BUMN. (2012). Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S-MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
- Keraf, S.A. (1998). *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya.* Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.* Jakarta: KNKG.

- Kurniawan, D.M. & Indriantoro, N. (2000). The Role of Disclosure in Strengthening Corporate Governance & Accountability. Makalah disajikan pada *The Second Asian Roundtable on Corporate Governance Hongkong China 31 May – 2 June 2000*.
- Mankiw, N.G. (2009). *Principles of Economics: Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- McKinsey & Company. *Global Investor Opinion Survey 2002: Key Findings, July 2002*. Diunduh Agustus 2008 di www.mckinsey.com/governance.
- McMullen, D.A. (1996). Audit Committee Performance: An Investigation of The Consequences Associated with Audit Committees. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 15(1). 88-103.
- Moeljono, D. (2005). *Good Corporate Culture sebagai Inti dari Good Corporate Governance*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo.
- Mokhtar, S.M. et.al. (2009). Corporate Governance Practices and Firms Performance: The Malaysian Case. *Journal of Money, Investment and Banking ISSN 1450-288X Issue 11 © EuroJournals Publishing, Inc. 2009*.
- Monks, R.A.G. & Minow, N. (2004). *Corporate Governance*. United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd.
- Mudrajad, K. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Bagaimana menulis dan meneliti*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nadler, D.A., Behan, B.A., & Nadler, M.B. (2006). *Building Better Board: a Blueprint for Effective Governance*. San Fransisco: Jossey-Bass a Wiley Imprint.
- Nam, S.W. (2004). Survey of Corporate Governance Practices in Indonesia, Thailand and Korea. Adbi Research Policy Brief No. 8 Corporate Governance. Diunduh November 2010 dari <http://www.adbi.org/research-policy-brief/>.
- Noer, R. (1998). *Menggugah Etika Bisnis Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
- Noor, H.F. (2011). *Ekonomi Manajerial (edisi revisi)*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Nugroho, R.D. & Siahaan, R. (Ed) (2006). *BUMN Indonesia: Isu, Kebijakan, dan Strategi*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo.
- Nur'ainy, Renny. (2011) *Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance pada Return Saham melalui Efisiensi Operasi Perusahaan*. Tesis Doktor Ilmu Ekonomi tidak dipublikasikan Fakultas Pascasarjana Universitas Gunadarma jakarta.

- Nuswandari, C. (2009). Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 16(2), 70-82.
- Pranata, Y. (2007). *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan*. Skripsi Sarjana tidak dipublikasikan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Prasetyantoko, A., (2008). *Corporate Governance: Pendekatan Institusional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rampersad, H.K. (2006). *Total Performance Scorecard. Konsep Manajemen Baru: Mencapai Kinerja dengan Integritas*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Riandi, D. & Siregar, H.S. (2011). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Return on Asset, Net Profit Margin, dan Earning Per Share pada Perusahaan yang Terdaftar di Corporate Governance Perception Index. *Jurnal Ekonomi*. 14(3). 127-133.
- Rosenman, K.M.Z. (2004). The Ratings Game: Corporate Governance Ratings and Why You Should Care. Artikel dalam *Global Corporate Governance Guide 2004: best practice in the boardroom*. Diunduh Januari 2012 dari <http://www.kattenlaw.com/>.
- Samuelson, P.A. & Nordhaus, W.D., *Economics* (15th ed.). (1995). McGraw-Hill, Inc.
- Santoso, S. (2012). *Menguasai Statistik Dengan SPSS 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sarwono, J. (2012). *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif menggunakan Prosedur SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Satyanugraha, H. (2003). *Etika Bisnis: Prinsip dan Aplikasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi (LPFE) Universitas Trisakti.
- Sheath, R. (2010). *Board Effectiveness: Avoiding The Pitfalls*. Ireland: Accountancy Ireland.
- Simanjuntak, D.S. (2009). *Good Corporate Governance in Post Crisis Indonesia: Initial Conditions, Windows of Opportunity and Reform Agenda*. Dokumen yang tidak dipublikasikan.
- Simon, H.A. (1986). Decision Making and Problem Solving. Artikel di *Research Briefings 1986: Report of the Research Briefing Panel on Decision Making and Problem Solving*. Washington, DC: National Academy Press.
- Sukirno, S. (2012). *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar (edisi ketiga)*. Jakarta, Rajawali Pers.

- Supatmi. (2007). Corporate Governance dan Kinerja Keuangan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. 14. 183-192.
- Surya, I. & Yustiavandana, I. (2006). *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tarigan, R. (2007). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sejak Era Reformasi (1998). Pidato pengukuhan jabatan guru besar tetap dalam bidang Operation Research pada Fakultas Ekonomi, diucapkan di hadapan *Sidang Rapat Terbuka Universitas Sumatra Utara pada 3 Februari 2007*. Medan. Diunduh Januari 2012 dari <http://www.usu.ac.id/>.
- The Institute for Corporate Governance. *Tata Kelola Perusahaan*. Diunduh September 2010 sampai dengan Oktober 2012 dari <http://www.iicg.org/>
- Tjager, I.N .et al. (2003). *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- Universitas Atmajaya Jakarta. *Tata Kelola Teknologi Informasi*. Dokumen yang dipublikasikan. Diunduh September 2012 dari <http://yys.atmajaya.ac.id/>.
- Wardani, D.K. (2008). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan di Indonesia*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Warsono, S., Amalia, F. & Rahajeng, D.K. (2009). *Corporate Governance: Concept and Model*. Yogyakarta: Center for Good Corporate Governance Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.

Data Penelitian

	Return on Equity (%)	Pendapatan (jutaan Rp)	Debt Equity Ratio (%)	Good Corporate Governance (%)	Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)	Dummy Dampak Krisis Ekonomi
1994	3.51	313,937	13.78	43.60	7.54	0
1995	5.06	439,303	14.94	43.60	8.21	0
1996	6.30	469,926	24.98	43.60	7.82	0
1997	6.41	560,362	40.58	43.60	4.70	0
1998	26.64	951,191	148.76	43.60	(13.13)	1
1999	38.32	705,906	103.54	43.60	0.79	1
2000	4.72	725,353	145.31	43.60	4.92	0
2001	18.17	1,027,606	110.41	43.60	3.44	0
2002	19.02	1,090,473	99.65	44.60	4.50	0
2003	20.76	1,206,490	73.50	80.66	4.72	0
2004	19.46	1,438,287	56.46	80.66	5.03	0
2005	20.94	1,642,410	33.34	80.26	5.68	0
2006	15.47	1,744,120	27.41	81.00	5.48	0
2007	20.20	1,968,070	28.15	81.36	6.30	0
2008	21.44	2,457,386	30.51	80.00	6.10	0
2009	17.86	2,498,700	32.31	77.72	4.50	0
2010	20.81	3,013,312	28.07	81.56	6.00	0
2011	21.42	4,428,197	31.90	81.58	6.30	0

Kutipan Laporan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II

Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 1994 s.d. 1999

	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Aktiva Lancar	166,499,564,700	157,729,776,891	219,849,068,465	380,394,353,930	448,287,606,381	1,706,992,774,305
Aktiva Tidak Lancar	2,655,510,587,703	2,802,373,811,227	3,097,072,606,185	3,561,618,583,703	2,894,810,912,389	2,793,259,087,107
JUMLAH AKTIVA	2,822,010,152,403	2,960,103,588,118	3,316,921,674,650	3,942,012,937,633	3,343,098,518,770	4,500,251,861,412
Kewajiban Lancar	73,477,684,549	138,290,907,927	216,947,265,240	239,536,550,816	304,839,692,842	730,773,996,039
Kewajiban Tidak Lancar	268,200,171,771	245,799,483,716	443,777,131,033	893,469,569,014	1,904,154,271,703	1,546,407,676,230
JUMLAH KEWAJIBAN	341,677,856,320	384,090,391,643	660,724,396,273	1,133,006,119,830	2,208,993,964,545	2,277,181,672,269
Selisih kurs yang ditangguhkan					(372,686,046,411)	
Bantuan Pemerintah YBDS		3,073,568,500	10,083,820,500	11,882,794,500	2,412,959,000	4,316,804,000
HAK MINORITAS		1,994,257,302	1,347,317,127	4,846,485,000	19,424,963,175	19,498,655,439
JUMLAH EKUITAS	2,480,332,296,083	2,570,945,370,673	2,644,761,140,750	2,792,277,538,303	1,484,952,678,461	2,199,254,729,654
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,822,010,152,403	2,960,103,588,118	3,316,921,674,650	3,942,012,937,633	3,343,098,518,770	4,500,251,861,362
Pendapatan Usaha Bersih	313,936,519,675	439,302,939,700	469,926,316,330	560,362,488,537	951,190,621,285	705,906,165,473
Beban Usaha	186,727,484,717	251,227,283,519	296,008,399,974	401,905,725,095	581,805,887,971	443,270,946,664
Laba Usaha	127,209,034,958	188,075,651,181	173,917,916,356	158,456,763,442	369,384,733,314	262,635,218,809
Pendapatan/Beban Lain-lain	3,720,877,523	(474,264,619)	36,727,057,074	72,122,862,753	157,141,458,071	901,889,442,308
Pendapatan dr Perusahaan Asosiasi	-	(7,673,431,076)	(885,654,744)	-	(4,008,286,856)	(4,153,774,511)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(43,784,995,150)	(49,739,687,800)	(43,758,421,400)	(50,277,774,100)	(119,818,193,800)	(311,374,783,600)
Hak Minoritas	-	(14,742,698)	(646,940,175)	1,294,167,873	7,038,426,186	6,225,698,842
LABA BERSIH	87,144,917,331	130,203,010,384	166,647,837,461	179,007,684,222	395,661,284,543	842,770,404,164

Kutipan Laporan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II

Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2000 s.d. 2005

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Aktiva Lancar	1,155,115,758,000	954,884,989,527	804,409,602,140	643,423,485,309	825,246,672,197	841,568,001,306
Aktiva Tidak Lancar	3,186,799,982,000	3,211,474,115,664	3,261,915,140,582	3,528,560,282,331	3,587,053,558,624	3,625,490,427,878
JUMLAH AKTIVA	4,341,915,740,000	4,166,359,105,191	4,066,324,742,722	4,172,083,767,640	4,412,300,230,821	4,467,058,429,184
Kewajiban Lancar	318,706,224,000	1,569,617,698,000	401,278,854,026	525,000,365,990	614,601,568,368	505,749,533,719
Kewajiban Tidak Lancar	2,236,698,065,000	601,143,042,191	1,615,235,992,195	1,232,831,764,958	968,319,452,549	604,164,165,036
JUMLAH KEWAJIBAN	2,555,404,289,000	2,170,760,740,191	2,016,514,846,221	1,757,832,130,948	1,582,921,020,917	1,109,913,698,755
Selisih kurs yang ditangguhkan						
Bantuan Pemerintah YBD5	4,316,804,000	5,485,554,000	4,471,413,343			
HAK MINORITAS	23,647,402,000	24,076,287,000	21,683,532,922	22,801,095,003	25,869,684,809	28,142,454,824
JUMLAH EKUITAS	1,758,547,245,000	1,966,036,524,000	2,023,634,950,256	2,391,450,541,689	2,803,509,525,096	3,329,002,275,605
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,341,915,740,000	4,166,359,105,191	4,066,304,742,742	4,172,083,767,640	4,412,300,230,822	4,467,058,429,184
Pendapatan Usaha Bersih	725,353,144,000	1,027,506,000,186	1,090,472,787,449	1,206,489,699,360	1,438,287,031,949	1,642,410,279,291
Beban Usaha	515,418,533,000	671,309,542,854	768,609,524,943	835,197,096,173	896,752,683,702	987,960,447,504
Laba Usaha	209,934,611,000	356,296,457,332	321,863,262,506	371,292,603,187	541,534,348,247	654,449,831,787
Pendapatan/Beban Lain-lain	(340,435,209,000)	(215,747,498,170)	(109,729,938,325)	(26,798,302,887)	(144,026,047,066)	229,802,197,265
Pendapatan dr Perusahaan Asosiasi	242,566,040,000	288,169,919,296	263,851,386,852	264,469,244,464	282,219,016,453	
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(25,476,280,000)	(67,947,807,371)	(89,198,978,252)	(109,472,630,612)	(128,986,496,721)	(181,584,980,879)
Hak Minoritas	3,514,969,000	3,626,184,604	1,871,642,554	2,969,917,128	5,186,386,179	5,682,483,065
LABA BERSIH	83,074,193,000	357,144,886,483	384,914,090,227	496,520,997,024	545,554,434,734	696,984,565,108

Kutipan Laporan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II

Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2006 s.d. 2011

	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
Aktiva Lancar	1,227,417,764,851	1,749,553,733,556	2,091,501,737,898	2,066,550,000,000	2,140,861,802,923	1,892,398,930,499
Aktiva Tidak Lancar	3,474,388,595,988	3,692,242,426,408	4,322,245,329,167	4,974,940,000,000	5,638,391,912,958	7,254,749,508,056
JUMLAH AKTIVA	4,701,806,360,839	5,441,796,159,964	6,413,747,067,065	7,041,490,000,000	7,779,253,715,881	9,147,148,438,555
Kewajiban Lancar	458,738,070,988	624,827,388,514	908,521,824,967	975,070,000,000	962,933,583,158	1,401,677,302,947
Kewajiban Tidak Lancar	545,693,730,287	562,895,167,885	581,839,770,792	734,560,000,000	731,664,930,787	799,733,545,923
JUMLAH KEWAJIBAN	1,004,431,801,275	1,187,722,556,399	1,490,361,595,759	1,709,630,000,000	1,694,598,513,945	2,201,410,848,870
Selisih kurs yang ditangguhkan Bantuan Pemerintah YBDS						
HAK MINORITAS	32,400,758,625	34,844,303,900	33,653,273,703	41,220,000,000	47,069,638,096	45,405,018,451
JUMLAH EKUITAS	3,664,973,800,939	4,219,229,299,665	4,884,732,197,603	5,290,640,000,000	6,037,585,563,842	6,900,332,571,236
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,701,806,360,839	5,441,796,159,964	6,413,747,067,065	7,041,490,000,000	7,779,253,715,883	9,147,148,438,557
Pendapatan Usaha Bersih	1,744,120,144,649	1,968,069,713,242	2,457,386,245,127	2,498,700,000,000	3,013,312,202,945	4,428,196,628,375
Beban Usaha	1,191,898,676,246	1,361,991,219,045	1,860,527,909,423	1,674,400,000,000	1,988,505,177,926	3,084,553,446,196
Laba Usaha	552,221,468,403	606,078,504,197	596,858,335,704	824,300,000,000	1,024,807,025,019	1,343,643,182,179
Pendapatan/Beban Lain-lain	182,294,460,183	463,833,258,392	716,090,890,150	274,400,000,000	449,376,583,056	559,963,458,606
Pendapatan dr Perusahaan Asosiasi				235,000,000,000		
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(157,545,485,348)	(209,432,428,113)	(255,364,896,802)	(378,400,000,000)		
Hak Minoritas	9,984,548,708	8,390,583,295	10,402,303,669	10,500,000,000	14,057,415,370	16,445,650,414
LABA BERSIH	566,985,894,530	852,088,751,181	1,047,182,025,383	944,800,000,000	1,256,176,819,369	1,478,273,650,394

```

GET
  FILE='D:\Thesis\Final\Data\source data.sav'.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
REGRESSION
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT ROE
  /METHOD=ENTER GCG DER Pendapatan Growth Dummy
  /SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED)
  /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID).

```

Regression

		Notes
Output Created		30-OCT-2012 10:46:21
Comments		
Input	Data	D:\Thesis\Final\Data\source data.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data	18
Missing Value Handling	File	
	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
Syntax	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
		REGRESSION
		/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV
		CORR SIG N
		/MISSING LISTWISE
		/STATISTICS COEFF OUTS R
		ANOVA COLLIN TOL
		/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
		/NOORIGIN
		/DEPENDENT ROE
	/METHOD=ENTER GCG DER	
	Pendapatan Growth Dummy	
	/SCATTERPLOT=(*SRESID	
	,*ZPRED)	
	/RESIDUALS DURBIN	
	HISTOGRAM(ZRESID)	
	NORMPROB(ZRESID).	

	Processor Time	00:00:01.59
	Elapsed Time	00:00:01.20
Resources	Memory Required	2828 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	880 bytes

[DataSet1] D:\Thesis\Final\Data\source data.sav

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
ROE	17.0283	8.93666	18
GCG	62.1222	18.96388	18
DER	56.8722	45.18021	18
Pendapatan	1482.11	1072.644	18
Growth	4.3833	4.68838	18
Dummy	.11	.323	18

Correlations

		ROE	GCG	DER	Pendapatan	Growth	Dummy
Pearson Correlation	ROE	1.000	.324	.454	.367	.629	.629
	GCG	.324	1.000	-.256	.757	-.355	-.355
	DER	.454	-.256	1.000	-.243	.304	.304
	Pendapatan	.367	.757	-.243	1.000	-.222	-.222
	Growth	-.487	.263	-.212	.138	-.819	-.819
	Dummy	.629	-.355	.304	-.222	1.000	1.000
	Sig. (1-tailed)	ROE	.	.095	.029	.067	.003
GCG		.095	.	.153	.000	.074	.074
DER		.029	.153	.	.166	.110	.110
Pendapatan		.067	.000	.166	.	.188	.188
Growth		.020	.145	.199	.292	.000	.000
Dummy		.003	.074	.110	.188	.	.
N	ROE	18	18	18	18	18	18
	GCG	18	18	18	18	18	18
	DER	18	18	18	18	18	18
	Pendapatan	18	18	18	18	18	18
	Growth	18	18	18	18	18	18
	Dummy	18	18	18	18	18	18

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Dummy, Pendapatan, DER, GCG, Growth ^b		Enter

a. Dependent Variable: ROE

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.956 ^a	.913	.877	3.13550	2.220

a. Predictors: (Constant), Dummy, Pendapatan, DER, GCG, Growth

b. Dependent Variable: ROE

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1239.710	5	247.942	25.220	.000 ^b
	Residual	117.976	12	9.831		
	Total	1357.686	17			

a. Dependent Variable: ROE

b. Predictors: (Constant), Dummy, Pendapatan, DER, GCG, Growth

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-9.021	3.790		-2.380	.035	
	GCG	.238	.064	.502	3.675	.003	.389
	DER	.082	.018	.418	4.563	.001	.871
	Pendapatan	.002	.001	.257	1.951	.075	.418
	Growth	.220	.284	.115	.773	.454	.326
	Dummy	22.988	4.314	.832	5.329	.000	.297

Collinearity Diagnostics^a

Model Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions					
			(Constant)	GCG	DER	Pendapatan	Growth	Dummy
1	3.983	1.000	.00	.00	.01	.01	.01	.00
2	1.350	1.717	.00	.00	.02	.00	.03	.13
3	.405	3.137	.00	.00	.38	.13	.03	.01
4	.173	4.805	.02	.00	.52	.16	.24	.27
5	.071	7.489	.14	.08	.05	.31	.64	.47
6	.018	14.765	.84	.92	.02	.39	.05	.12

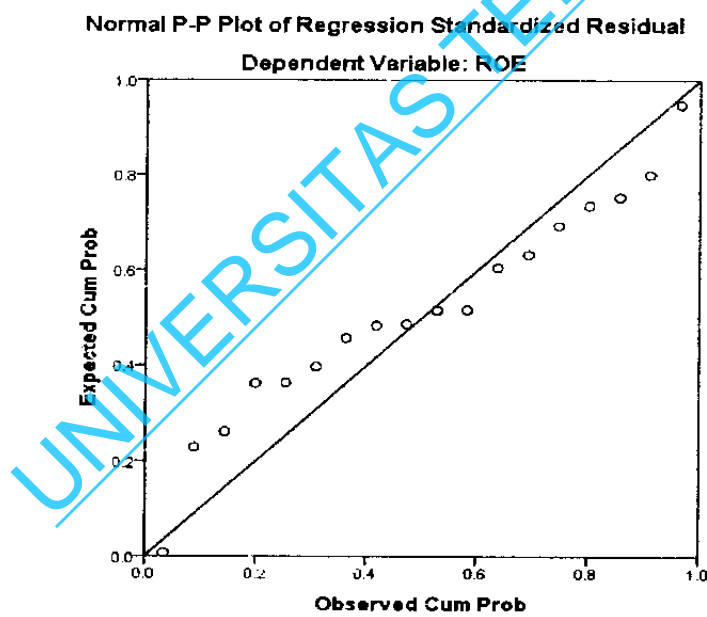
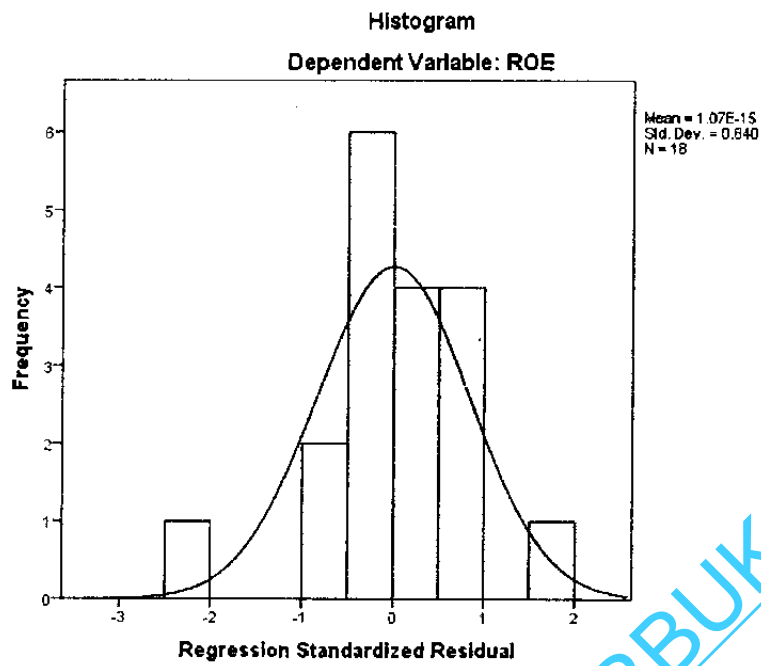
a. Dependent Variable: ROE

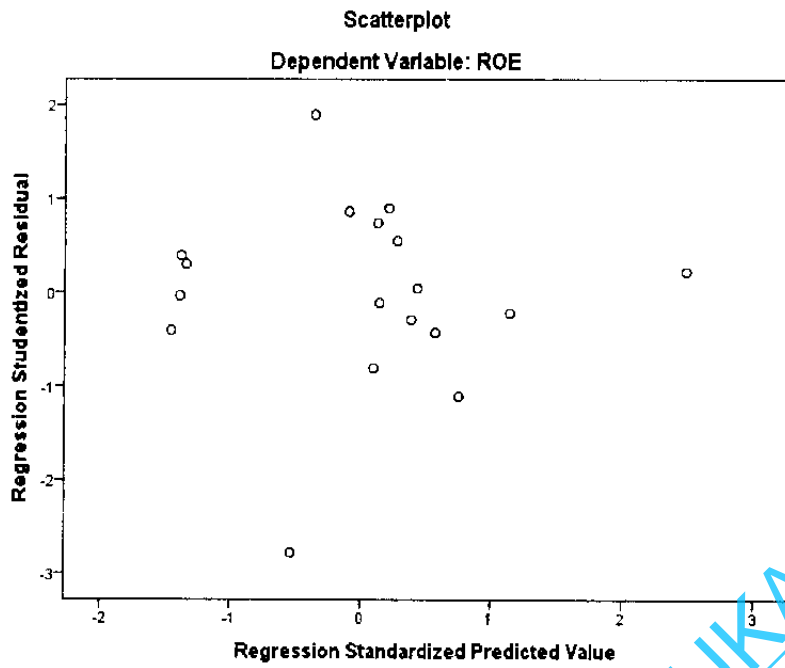
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	4.5980	38.1972	17.0283	8.53956	18
Std. Predicted Value	-1.456	2.479	.000	1.000	18
Standard Error of Predicted Value	1.108	3.086	1.707	.620	18
Adjusted Predicted Value	4.8708	34.4023	17.1750	8.61806	18
Residual	-7.71527	5.09450	.00000	2.63434	18
Std. Residual	-2.461	1.625	.000	.840	18
Stud. Residual	-2.780	1.894	-.016	.982	18
Deleted Residual	-9.84622	6.92364	-.14763	3.92186	18
Stud. Deleted Residual	-4.460	2.166	-.096	1.315	18
Mahal. Distance	1.177	15.522	4.722	4.531	18
Cook's Distance	.000	.413	.095	.138	18
Centered Leverage Value	.069	.913	.278	.267	18

a. Dependent Variable: ROE

Charts





UNIVERSITAS TERBUKA

**Tabel Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Kunjungan Kapal,
Ekspor dan Impor, serta Pendapatan Usaha Pelindo II**

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	kunjungan kapal (Unit)	Ekspor (kg)	Impor (kg)	Pendapatan Usaha Pelindo II (Rp)
1994	7.54	-	225,343,807,583	46,143,795,282	313,936,519,675
1995	8.21	241 625	246,109,169,256	55,360,195,454	439,302,939,700
1996	7.82	161 026	214,184,335,442	58,819,380,783	469,926,316,330
1997	4.70	190 504	254,456,915,726	59,148,389,485	560,362,488,537
1998	-13.13	260 883	244,924,522,611	51,261,188,371	951,190,621,285
1999	0.79	263 608	234,966,062,988	62,240,824,887	705,906,165,473
2000	4.92	244 270	225,102,834,391	67,388,922,691	725,353,144,000
2001	3.44	246 986	272,456,624,930	65,566,789,867	1,027,606,000,186
2002	4.50	335 504	223,270,074,197	72,741,174,804	1,050,472,787,449
2003	4.72	167 978	219,566,835,175	69,705,137,458	1,206,489,699,360
2004	5.03	204 623	232,317,444,037	81,320,559,349	1,438,287,031,949
2005	5.68	335 504	258,731,545,764	83,664,535,874	1,642,410,279,291
2006	5.48	238 448	327,172,270,158	83,808,366,126	1,744,120,144,649
2007	6.30	296 000	342,773,529,783	89,935,580,813	1,968,069,723,242
2008	6.10	352 043	355,053,970,205	98,664,341,959	2,457,386,245,127
2009	4.50	239 276	378,999,100,814	91,354,405,895	2,498,700,000,000
2010	6.00	245 447	478,846,797,632	110,701,002,318	3,013,312,202,945
2011	6.30	-	582,219,779,283	128,221,634,466	4,428,196,628,375

